# ANALISA PERLAKUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA SULAWESI BARAT

Diajukan Oleh

Yuniarto Marsal Saputra

4518013037

**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Guna Memperoleh Gelar**

**Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

| | |
|---|---|
| Judul | : Analisa Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat |
| Nama Mahasiswa | : Yuniarto Marsal Saputra |
| Stambuk/NIM | : 4518013037 |
| Fakultas | : Ekonomi dan Bisnis |
| Program Studi | : Akuntansi |
| Tempat Penelitian | : Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat |

Telah Disetujui:

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Dr. Firman Manne, SE.,M.Si.,AK.CA** | **Nur Fadhila Amri.SE,.AK.,M.Si.,CSRS.,CSRA** |

Mengetahui dan Mengesahkan:

| Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa | Ketua Program Studi Akuntansi |
|---|---|
| **Dr. HJ. Herminawati Abu Bakar SE., M.Si** | **Thanwain. SE., M.Si** |

Tanggal Pengesahan:

## PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuniarto Marsal Saputra

NIM : 4518013037

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Judul : Analisa Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain atau memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan yang saya buat secara sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 1 September 2022

Mahasiswa Yang Bersangkutan

**Yuniarto Marsal Saputra**

**4518013037**

**ANALISA PERLAKUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA SULAWESI BARAT**

**Oleh:**
**Yuniarto Marsal Saputra**
**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**
**Universitas Bosowa Makassar**

## ABSTRAK

**Yuniarto Marsal Saputra, 2022.** Analisa Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat. Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar. Dibimbing oleh Bapak Dr. Firman Manne, SE.,M.Si.,AK.CA selaku pembimbing I dan Ibu Nur Fadhila Amri.SE,.AK.,M.Si.,CSRS.,CSRA selaku pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi sektor publik di Pemerintah Daerah Kabupten Mamasa, Sulawesi Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian dengan data kualitatif yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat sudah cukup baik dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang baru.

**ANALISA PERLAKUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA SULAWESI BARAT**

**Oleh:**
**Yuniarto Marsal Saputra**
**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis**
**Universitas Bosowa Makassar**

***ABSTRACT***

***Yuniarto Marsal Saputra****, 2022. Analysis of Public Sector Accounting Treatment in the Local Government of Mamasa Regency, West Sulawesi. Accounting study program, Faculty of Economics and Business, University of Bosowa Makassar. Supervised by Mr. Dr. Firman Manne, SE., M.Si., AK.CA as supervisor I and Mrs. Nur Fadhila Amri.SE,.AK., M.Si., CSRS., CSRA as supervisor II.*

*The purpose of this study was to determine how the accounting treatment of the public sector in the local government of Mamasa Regency, West Sulawesi. The research method used is descriptive analysis method with a qualitative approach, namely research with qualitative data which is then processed and analyzed to draw conclusions. The data collection method used is the technique of observation, interviews and documentation.*

*Based on the results of the study, it shows that the accounting treatment in the Mamasa Regency Government of West Sulawesi is quite good and in accordance with the new Government Accounting Standards.*

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Analisa Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat" . Adapun maksud dari penyusunan karya tulis ini adalah sebagai persyaratan dalam menyelesaikan mata kuliah pada program Sarjana Strata Satu (S1) Akuntansi Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian karya tulis ini.

1. Pertama-tama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si.
2. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abu bakar SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Indrayani Nur, S.Pd SE., M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Thanwain,S.E.,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
5. Bapak Dr. Firman Manne, SE.,M.Si.,AK.CA selaku dosen pembimbing I dalam proses penyusunan skripsi atas pencapaian gelar sarjana ekonomi.
6. Ibu Nur Fadhila Amri.SE,.AK.,M.Si.,CSRS.,CSRA selaku dosen pembimbing II dalam proses penyusunan skripsi atas pencapaian gelar sarjana ekonomi.

7. Seluruh pegawai di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa yang telah mengizinkan dan membantu penulis untuk melaksanakan penelitian.
8. Kepada Bapak Yulius Arruan Banga dan Ibu Kusmaning selaku orang tua penulis yang selalu memberikan arahan serta motivasi sehingga skripsi ini bisa selesai.
9. Seluruh keluarga besar penulis yang tiada henti-hentinya selalu mendukung dan memotivasi dalam pembuatan skripsi ini.
10. Untuk sahabat-sahabat penulis terimakasih atas doa ,dukungan serta semangatnya sehingga saya bisa sampai pada tahap ini.
11. Buat yang terkasih Freni Novanda terimakasih selalu memberikan support dan motivasi.
12. Untuk teman-teman seperjuanganku di Akuntansi B 2018 terimakasih buat 4 tahunnya terimakasih sudah mau berjuang sama-sama sampai detik ini dan terimakasih sudah menjadi teman kelas yang baik

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai tambahan informasi dan referensi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Makassar, 1 September 2022

Penulis

**Yuniarto Marsal Saputra**

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**

**HALAMAN PENGESAHAN** ..... **ii**

**PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI**……**iii**

**ABSTRAK**……...**iv-v**

**KATA PENGANTAR**……..**vi-vii**

**DAFTAR ISI**..... **viii**

**BAB I PENDAHULUAN**..... **1**

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Rumusan Masalah ..... 2

1.3 Tujuan Penelitian ..... 3

1.4 Manfaat Penelitian ..... 3

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... **4**

2.1 Kerangka Teori ..... 4

2.1.1 Akuntansi ..... 4

2.1.2 Perlakuan akuntansi ..... 5

2.1.3 Akuntansi Sektor Publik ..... 6

2.2 Kerangka Pikir ..... 20

**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **22**

3.1 Lokasi Penelitian ..... 22

3.2 Jenis dan Sumber Data ..... 22

3.2.1 Jenis Data ..... 22

3.2.2 Sumber Data ..... 22

3.3 Teknik pengumpulan data ..... 23

3.4 Metode Analisis data ..... 24

3.5 Definisi Operasional ..... 25

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 26**

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 26

4.2 Hasil Penelitian ..... 43

4.3 Analisis Data Hasi Penelitian..... 55

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... 61**

5.1 Kesimpulan ..... 61

5.2 Saran..... 61

**DAFTAR PUSTAKA ..... 63**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik saat ini mendapat perhatian besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan dan perusahaan milik Negara/Daerah. Hal ini disebabkan karena adanya tuntutan dari masyarakat untuk dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Selain itu, tuntutan tersebut juga menekankan untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah saat mewajibkan praktek akuntansi yang diterapkan diseluruh pemerintahan menerapkan standar yang baru yakni dari PP tahun 2005 ke tahun 2010. Standar ini merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan yang standar, termasuk didalamnya tentang perlakuan akuntansi, pengakuan akuntansi, serta kebijakan akuntansi.

Bertema pada perlakuan akuntansi yang ada di sektor publik/pemerintahan saat ini dikatakan masih sangat minim dan mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang baru dalam penyusunan Laporan Keuangan tersebut. Selain itu, keterbatasan kemampuan SDM dalam mengoperasikan perkembangan teknologi canggih sehingga mengabaikan standar yang baru. Mengabaikan dalam hal ini bukan tidak mau menerapkan standar yang baru. Karena pada dasarnya pihak pemerintah

sudah membentuk pelatihan setiap tahunnya kepada setiap karyawan agar bisa tetap berkembang dan tidak tertinggal. Nyatanya, kemampuan setiap individu yang mendapat pelatihan tidak semua sama. Ada yang bisa langsung menerapkan, ada yang butuh waktu untuk memahami, dan ada yang benar-benar belum bisa menerapkan standar tersebut. Sehingga, akuntasi yang ada di sektor pemerintahan tersebut belum mendapat perlakuan yang baik.

Salah satu pemerintahan yang mengalami hal demikian ada di pemerintah daerah Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat. Pada pemeritahan tersebut, perlakuan terhadap akuntansinya belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa akun yang semestinya ditampilkan pada laporan keuangan dengan standar baru, belum juga ditampilkan dengan argumen bahwa tanpa akun tersebut juga mereka tetap bisa memperlakukan akuntansi dipemerintahannya dengan sangat baik. Sehingga menjadikan standar baru tidak begitu penting untuk diikuti dalam waktu cepat.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas maka hal ini yang menarik penulis untuk melakukan peneltian dengan judul**"Analisa Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat"**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, masalah yang akan di rumuskan dalam penelitianini yaitu Bagaiman Perlakuan akuntansi Sektor Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan akuntansi sektor publik pada pemerintah daerah Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh atau diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana perlakuan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah.

2. Bagi Intansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa

   Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah.

3. Pihak lain.

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi, khususnya untuk mengkaji topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas di dalam penelitian ini.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Kerangka Teori

Menguraikan mengenai teori-teori yang mendasari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menghindari teori-teori yang tidak mempunyai hubungan dengan penelitian tersebut. Landasan teori ini juga menguraikan tentang teori-teori yang mendukung alat analisis yang akan dipergunakan dalam penelitian.

### 2.1.1 Akuntansi

1. Pengertian akuntansi

Secara umum pengertian akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan.

Kieso, dkk (2018:4) menyatakan bahwa akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan." Menurut Hanggara (2019:1) mengemukakan bahwa Akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan dan pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan.

> Akuntansi merupakan seni yang mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, dan kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan

> oleh pihak-pihak yang berkepentingan.untuk menghasilkan proses informasi keuangan yang berguna bagi para pemakai laporan (users) dalam pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan organisasi (Sumarsan, 2017:1).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi akuntansi adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasikan, mencatat dan menyajikan informasi yang diberikan organisasi melalui laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi suatu organisasi.

### 2.1.2 Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi adalah aturan aturan atau langkah langkah yang di lakukan dalam proses akuntansi yang meliputi pengakuan, pencatatan dan penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan perusahaan (Kieso dan Weygant, 2019:92).

> Menurut Harnando (2020), mendefenisikan perlakuan akuntansi adalah "suatu disiplin analisa yang mencangkup kegiatan mengidentifikasi berbagai transaksi atau peristiwa yang merupakan kegiatan pencatatan sehingga informasi yang relevan dan mempunyai hubungan antarayang satu dan lainnyayang mampu memberikan gambaran secara layak tentang keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan akan digabungkan dan di sajikan dalam bentuk laporan keuangan "

Menurut Suwardjono (2016:40) menyatakan bahwa Perlakuan akuntansi adalah tindakan yang dikenakan terhadap suatu objek yang bersifat finansial yang meliputi pengukuran (measurement) dan penilaian (valuation), pengakuan (recognition) dan penyajian (presentation).

Adapun tahap tahap dari perlakuan akuntansi meliputi :

1. Pengukuran dan Penilaian, merupakan penetuan jumlah rupiah suatu transaksi yang akan dicatat. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah yang akan dicatat pertama kali untuk suatu transaksi, sedangakan penilaian lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah yang harus ditetapkan untuk tiap pos laporan pada tanggal laporan.
2. Pengakuan, merupakan proses pembentukan atau pencatatan suatu pos yang memenuhi definisi suatu unsur di dalam laporan keuangan.
3. Pengungkapan, bersangkutan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli di atas dapat di rumuskan bahwa perlakuan akuntansi merupakan suatu tindakan yang di lakukan dan suatu transaksi yang meliputi proses akuntansi yang terdiri dari proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, penilaian, penyajian informasi keuangan dari transaksi transaksi yang bersifat finansial dan hasilnya sebagai informasi untuk pengambilan suatu keputusan bai para pemakainya.

**2.1.3.Akuntansi Sektor Publik**

1. Pengertian Akuntansi sektor publik

Akuntansi sektor publik adalah suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan (Biduri, 2018:2)

Menurut Haryanto, dkk. (2017:1) Akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Dalam

beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya. Sedangkan menururut Halim dan Muhammad (2018:3), akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Jadi dapat di simpulkan Pengertian akuntansi untuk sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik. Laporan pengelolaan keuangan ini nantinya digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi keuangan pada pihak yang membutuhkan. Intinya, laporan pengelolaan keuangan ini sangat membantu saat ada pengambilan keputusan.

2. Tujuan Akuntansi untuk Sektor Publik

Berdasarkan American Accounting Association, tujuan utama akuntansi untuk sektor publik adalah untuk memberikan informasi dan laporan pengelolaan keuangan. Selanjutnya, laporan ini akan digunakan untuk pengendalian manajemen dan sebagai pertanggungjawaban. Berikut ini ulasan lengkapnya.

*a. Management Control*

Tujuan akuntansi sektor publik yang pertama adalah sebagai management control. Sebagai pengendalian manajemen, akuntansi untuk sektor publik akan memberikan informasi yang dibutuhkan lembaga publik dalam pengelolaan secara

tepat dan efisien. Akuntansi ini juga akan memberikan informasi penggunaan sumber daya yang sudah dianggarkan dalam lembaga publik.

*b.Accountability*

Tujuan akuntansi untuk sektor publik yang selanjutnya berhubungan dengan accountability. Jadi, akuntansi untuk sektor publik ini akan memberikan informasi penting yang dibutuhkan oleh manajer lembaga publik. Informasi ini nantinya digunakan manajer sebagai laporan pertanggungjawaban seluruh bidang di bawah kewenangannya.

Bukan hanya itu, informasi ini juga digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja yang dilakukan lembaga pemerintah. Jadi, publik dapat melihat transparansi tentang seperti apa penggunaan anggaran publik oleh lembaga pemerintah.

3. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi untuk sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi yang digunakan sektor swasta. Perbedaan utamanya terlihat dari lembaga atau instansi yang menggunakan kedua ilmu akuntansi tersebut. Akuntansi untuk sektor publik biasanya digunakan oleh lembaga pemerintah daerah dan pusat.

Akuntansi sektor publik melakukan serangkaian proses yang terdiri dari mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis, dan membuat laporan keuangan untuk sebuah organisasi publik sehingga informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkan bisa tersedia. Akuntansi sektor publik menyediakan informasi kepada manajer untuk melaporkan pelaksanaan

tanggungjawab secara tepat dan efektif sehingga pegawai pemerintah sebagai bawahannya bisa melaporkan kepada publik tentang hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

Mudahnya, karakteristik akuntansi sektor publik ini berfokus pada dua hal. Pertama, akuntansi untuk sektor publik berfokus pada sifat lembaga. Jadi, sifat akuntansi ini adalah khusus organisasi non profit yang tidak menghasilkan laba. Misalnya seperti lembaga pemerintahan.

Kedua, akuntansi untuk sektor publik berfokus pada tujuan lembaga. Sesuai namanya, akuntansi untuk sektor publik hanya menyediakan informasi pelayanan pada publik. Pelayanan untuk publik ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat.

Berikut ini karakteristik akuntansi sektor publik yang penting untuk diketahui.

a. Berdasarkan penggunaan, akuntansi jenis ini digunakan oleh lembaga pemerintah pusat maupun daerah.
b. Dari sisi sifatnya, akuntansi bersifat khusus untuk organisasi non profit yang tidak menghasilkan laba.
c. Sedangkan dari fokus tujuan lembaga, akuntansi hanya menyajikan informasi pelayanan kepada publik untuk kesejahteraan mereka.
d. Dilihat dari lingkungan, lembaga atau sektor publik bergerak pada lingkungan turbulence dan sangat kompleks.

4. Elemen-elemen Akuntansi Sektor Publik

Menurut Bastian (2019:12) menjelaskan bahwa elemen-elemen akuntansi sektor publik memiliki rangkaian siklus, antara lain :

a. Perencanaan Publik

Dalam bagian ini, hal-hal pokok yang wajib diketahui adalah perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, yaitu melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sebagaimana tertuang dalam UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Poin 1. Lebih dari itu, proses perencanaan yang dilaksanakan tersebut akan menentukan aktivitas dan fokus strategi organisasi sektor publik. Dalam prosesnya, memang perencanaan membutuhkan partisipasi publik yang akan sangat menentukan kualitas serta berterimanya arah dan tujuan organisasi. Lebih implisit, inti dari perencanaan adalah mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan.

b. Penganggaran Publik

Berdasarkan penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan supaya mencapai tujuan bernegara. Lebih dari itu, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat 15 dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi

tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pengelola atau pengguna anggaran dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran.

c. Realisasi Anggaran Publik

Secara teori, realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam bentuk program dan kegiatan nyata. Hal ini berarti fokus pelaksanaan anggaran terletak pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Selain itu, realisasi anggaran menunjuk pada arahan atau pengendalian sistematis dari proses-proses yang mengubah input menjadi barang dan jasa. Dalam hal ini, proses tersebut sangat terkait erat dengan kualitas keluaran.

d. Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, serta tindakan dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik. Barang dan jasa yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat

e. Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Secara umum, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai konsekuensinya, laporan keuangan harus menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuanga menggambarkan pencapaian kinerja

program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan.

f. Audit Sektor Publik

Secara umum, pemeriksaan atau auditing adalah suatu investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanismenya adalah memosisikan dan menggerakkan makna akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pemerintahan, badan usaha milik negara (BUMN), instansi pengelola aset negara lainnya, ataupun organisasi publik nonpemerintah, seperti partai politik, LSM, yayasan, dan organisasi di tempat peribadatan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengekspresikan suatu opini secara jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Maka itu, laporan auditor merupakan media yang mengekspresikan opini auditor atau dalam kondisi tertentu bisa juga menyangkal suatu opini.

g. Pertanggungjawaban Publik

Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah pertanggungjawaban tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) dan masyarakat yang memberikan amanah kepadanya berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku.

5. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi untuk sektor publik merupakan salah satu bidang akuntansi yang ruang lingkup penggunaannya untuk lembaga sektor publik. Lembaga publik

yang dimaksud adalah lembaga tinggi pemerintahan negara beserta departemen di bawah naungannya. Bukan hanya itu, pemerintah daerah, berbagai yayasan, partai politik, dan organisasi non profit juga menjadi ruang lingkup akuntansi sektor publik.

Mudahnya, lembaga sektor publik yang menggunakan bidang akuntansi ini merupakan lembaga yang menggunakan anggaran publik. Jadi, lembaga sektorpublik ini perlu memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini didapatkan dari laporan pengelolaan keuangan yang disusun dengan akuntansi untuk sektor publik. Di Indonesia, akuntansi untuk sektor publik ini umumnya mencakup beberapa bidang. Ada akuntansi untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, dan berbagai yayasan. Bahkan, bidang pendidikan dan kesehatan seperti sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit juga menjadi ruang lingkup. Semua lembaga tersebut membutuhkan akuntansi untuk sektor publik untuk pengelolaan anggaran.

Organisasi-organisasi sektor publik sering dijumpai dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang cenderung berurusan dengan instansi pemerintah, seperti departemen pendidikan, departemen tenaga kerja, kantor pencatatan sipil, atau kepolisian. Selain itu juga, seseorang berinteraksi dengan berbagai organisasi keagamaan, seperti MUI, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, PGI (Persatuan Gereja Indonesia), KWI (Konfrensi Waligereja Indonesia), dan lain-lain. Biduri (2018:3) menyatakan bahwa jika dilihat secara garis besar, jenis-jenis organisasi sektor publik dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Instansi Pemerintah Instansi pemerintah merupakan bagian organisasi sektorpublik yang berbentuk instansi pemerintah berikut.
   a. Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya: Kementrian seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan,dan lain-lain; serta Lembaga dan badan Negara sepeti KPU,KPK, dan lain-lain.
   b. Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah, Kantor Pencatatan Sipil,dan lain-lain.
2. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah

   Organisasi nirlaba milik pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi milik pemerintah. Contohnya: (a) Perguruan tinggi BHMN; (b) Rumah sakit milik pemerintah seperti RSCM, RS Daerah; dan (c) Yayasan-yayasan milik pemerintah. Pada perkembangannya, sebagian organisasi dalam kelompok ini dikategorikan dalam kelompok yang lebih khusus, yaitu Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
3. Organisasi Nirlaba Milik Swasta

   Organisasi nirlaba milik swasta ini merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Contohnya: (a) Yayasan seperti Sampoerna Foundation, Dompet Dhuafa Republika, dan lain-lain; (b) Sekolah dan universitas swasta; dan (c) Rumah sakit milik swasta.

Akuntansi merupakan sutau aktivitas yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik menurut Biduri (2018: 5) antara lain:

1. Faktor ekonomi meliputi antara lain:
   a) Pertumbuhan ekonomi
   b) Tingkat inflasi
   c) Tenaga kerja
   d) Nilai tukar mata uang
   e) Infrastruktur
2. Faktor politik meliputi antara lain:
   a) Hubungan negara dan masyarakat
   b) Legitimasi pemerintah
   c) Tipe rezim yang berkuasa
   d) Ideologi negara
   e) Elit politik dan massa
   f) Jaringan internasional
   g) Kelembagaan
3. Faktor kultural meliputi antara lain:
   a) Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya

b) Sistem nilai di masyarakat

c) Sosiologi masyarakat

d) Karakteristik masyarakat

e) Tingkat pendidikan

4. Faktor demografi meliputi antara lain:

a) Pertumbuhan penduduk

b) Struktur usia penduduk

c) Migrasi dan

Tingkat kesehatan.

6. Pencatatan Akuntansi Sektor Publik

Menurut Belinda (2021:63) Ada beberapa metode atau cara untuk pencatatan akuntansi yang umum dilakukan di dalam akuntansi sektor publik, yaitu :

a. Akuntansi anggaran (budgetary accounting) Akuntansi anggaran adalah sebuah pendataan akuntansi distribusi sebuah anggaran dan pentafsiran sebuah pendapatan dalam rangka penerapan dari APBN dan juga APBD. Tujuan utama dari akuntansi anggaran adalah pengawasan suatu anggaran. Akuntansi anggaran memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengawasan dan peninjauan anggaran sehingga nantinya dapat diketahui pelaksanaan penyerapan anggaran, keekonomian, efisiensi dan efektivitas anggaran serta keadaan keuangan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah.

b. Akuntansi kas (cash accounting) Akuntansi kas merupakan cara atau prosedur akuntansi tertua dalam sebuah sejarah akuntansi yang dilakukan dengan dberabad-abad, bahkan sampai ribuan tahun yang lalu. Sampai saat ini,

akuntansi kas masih banyak dipakai di sektor publik dan di pakai pada organisasi nirlaba. Akuntansi kas mencatat transaksi yang berkaitan dengan pendapatan dan pembayaran serta saldo kas pada buku kas.

c. Akuntansi akrual (accrual accounting) Akuntansi akrual adalah metode pendataan, atau penulisan akuntansi yang banyak dipakai dan dimanfaatkan dalam suatu organisasi bisnis. Akan tetapi, sekarang sektor publik dan organisasi nirlaba juga didorong untuk memakai akuntansi akrual. Tujuan penerapan akuntansi akrual di dalam sektor publik secara fundamental berbeda denganyang ada di dalam sektor bisnis. Penerapan akuntansi akrual di sektor publik berguna dalam menetapkan biaya jasa dan menetapkan harga atau tarif jasa.

d. Akuntansi komitmen (commitment accounting) Akuntansi komitmen berfungsi untuk mencatat atau mendata semua transaksi lebih awal dari akuntansi akrual dan kas. Suatu usaha diakui setalah ketika sebuah pesanan yang telah dikeluarkan untuk membeli barang atau jasa, disaat kontrak kerja dibuat, Ketika dana dibutuhkan untuk memenuhi obligasi jangka panjang. Akuntansi dana (fund accounting).

7. Praktik Sektor Akuntansi Sektor Publik di Indonesia

Dengan pentingnya akuntansi dalam organisasi publik, maka seharusnya penerapan akuntansi dilandaskan dengan memahami peranan akuntansi itu sendiri. Di Indonesia sendiri, berikut hal-hal yang perlu diketahui dari praktik akuntansinya.

a. Praktik Pertanggungjawaban Akuntansi Yang Layak

Kebijakan penghasilan serta pembayaran dari pusat pertanggungjawaban organisasi sektor publik, dapat dilakukan dengan pemenuhan otorisasi, baik dari DPR / DPRD atau komisaris. Terkadang, cara pemberian kuasa didapatkan dari proses demokrasi dengan cara pengambilan suara.

b. Prinsip Bruto

Seluruh pendapatan yang dibayarkan bruto, serta biaya yang terjadi, dibebankan sebagai pengurang pendapatan serta perlu dilaporkan dengan lengkap kepada setiap pusat pertanggungjawaban yang terkait.

c. Periodikal

Seluruh pengeluaran perlu dipertanggungjawabkan setiap periode, maka otorisasi pengeluaran akan dinilai berdasar prestasi periode tersebut. Dana berlebih di atas pengeluaran dapat diketahui dan dikembalikan kepada manajemen pusat pertanggungjawaban.

d. Spesifikasi

Pengeluaran yang bertujuan khusus, wajib didasarkan atas persetujuan DPR / DPRD atau komisaris. Konsep *by exception* atau pengecualian, perlu diatur dalam peraturan tersendiri dengan tidak mengabaikan tingkat pencapaian prestasi manajemen organisasi sektor publik tersebut.

8. Perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia

a. Akuntansi Sektor publik dan Good Governance

Good Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Jika mengacu pada World Bank, maka dapat didefinisikan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan vang bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran dalam alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative. Dalam prinsip good governance terdapat 3 hal yang ditekankan yaitu: penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, dan value of money.

b. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk membuat pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal, adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.
2. Akuntabilitas honzontal, adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

c. Privatisasi

Privatisasi merupakan salah satu upava mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan-perusahaan publik. Privatisasi artinya melakukan pelibatan modal swasta dalam struktur modal perusahaan publik sehigga kinerja finansial dapat dipengaruhi secara langung oleh investor melalui mekanisme pasar uang.

d. Otonomi Daerah

Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksaaan otonomi daerah dan sesentralisasi fiskal. Implikasi otonomi daerah terhadap akuntansi sektor publik adalah bahwa pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, DPRD, dan pihak-pihak lain yang menjadi stakeholder pemerintah daerah.

## 2.2 Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah dijelasan sebelumnya, Berikut ini akan dijelaskan kerangka pikir. Kerangka pikir merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pikir**

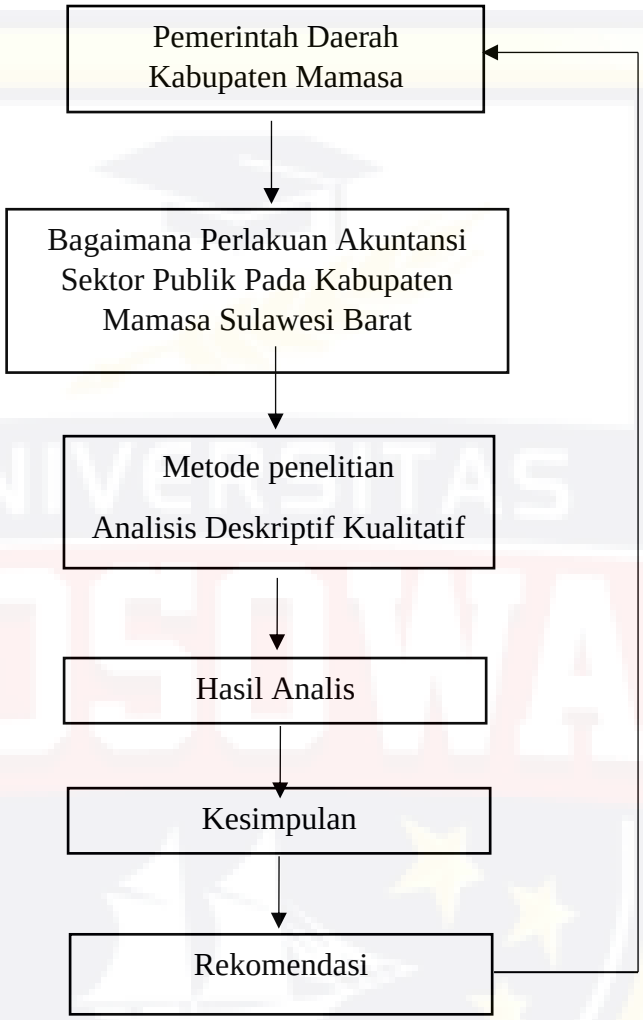


**Sumber data : diolah sendiri**

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## 3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam merampungkan penelitian ini adalah kurang lebih satu bulan yaitu bulan Juli –Agustus 2022.

## 3.2 Jenis Dan Sumber Data

### 3.2.1 Jenis data

Data Kualitatif, yaitu berupa gambaran umum perusahaan dan penjelasan mengenai penerapan analisa perlakuan akuntansi sektor publik di pemerintah daerah Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat.

### 3.2.2 Sumber Data

1. Data Primer

   Data primer merupakan data yang diperoleh dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa serta melakukan wawancara mendalam dengan pihak pimpinan dan beberapa staff yang ada kaitannya dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

   Data Sekunder merupakan data pendukung data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan mengkaji buku-buku atau referensi-referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

**1.**Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung baik terhadap karyawan dan hasil kinerja.

**2.**Metode wawancara

Metode Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan orang yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Wawancara dengan pimpinan dan karyawan pemerintah daerah kabupaten Mamasa tentang hal-hal yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

**3.**Studi Pustaka

Yaitu mengumpulkan materi-materi yang digunakan sebagai landasan teori yang berkaitan dengan makalah yang diteliti terutama mengenai Perlakuan akuntansi sektor publik pemerintah daerah kabupaten mamasa

**4.**Dokumentasi,

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Penelitian ditujukan pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan. Pengumpulan data dokumentasi menggunakan alat tulis manual maupun elektronik.

### 3.4 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang terpenting untuk memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data yaitu proses pengumpulan data agar dapat ditafsirkan. Analisis data dilakukan pada saat mengumpulkan data dan setelah pengumpulan data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif. Metode ini digunakan dengan menganalisa kenyataan atau fakta yang di temui di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori yang penulis dapatkan. Adapun urutannya yaitu:

1. Reduksi Data

Tahap ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasikan data kasar yang diambil dari lapangan. Inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data menjadi bentuk tulisan yang akan dianalisis.

2. Penyajian Data

Setelah data-data tersebut terkumpul kemudian peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok-kelompok agar peneliti lebih mudah untuk melakukan pengambilan kesimpulan.

3. Menarik Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti membandingkan data-data yang sudah didapat dengan data-data hasil wawancara dengan subjek dan informan yang bertujuan untuk menarik kesimpulan.

### 3.5 Definisi Operasional

1. Akuntansi adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis, mengklaifikasikan, mencatat dan menyajikan informasi yang diberikan organisasi melalui laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi suatu organisasi.
2. Perlakuan akuntansi merupakan suatu tindakan yang di lakukan dan suatu transaksi yang meliputi proses akuntansi yang terdiri dari proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, penilaian, penyajian informasi keuangan dari transaksi transaksi yang bersifat finansial dan hasilnya sebagai informasi untuk pengambilan suatu keputusan bai para pemakainya.
3. Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik. Laporan pengelolaan keuangan ini nantinya digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi keuangan pada pihak yang membutuhkan. Intinya, laporan pengelolaan keuangan ini sangat membantu saat ada pengambilan keputusan.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 4.1.1 Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat

Kabupaten Mamasa dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Polewali Mamasa. Luas wilayah Kabupaten Mamasa adalah sekitar 3.005,88 km2. Daerah ini terdiri dari 17 kecamatan dengan 168 desa definitif dan 13 kelurahan. Secara geografis Mamasa terdiri dari 37,02 persen desa (67 desa/ kelurahan) yang terletak di lembah dan 62,98 persen (114 desa/ kelurahan) yang merupakan wilayah lereng/ puncak.

Secara geografis, letak Kabupaten Mamasa berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
2. Sebelah Selatan : Wilayah Kecamatan Polewali, Kecamatan Matangnga, Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Tutallu Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
3. Sebelah Timur : Wilayah Kecamatan Saluputti dan Kecamatan Bonggakaradeng Kabupaten Tana Toraja serta Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju serta Kecamatan Malunda

Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

**Gambar 4.1 Peta Administratif Kabupaten Mamasa**

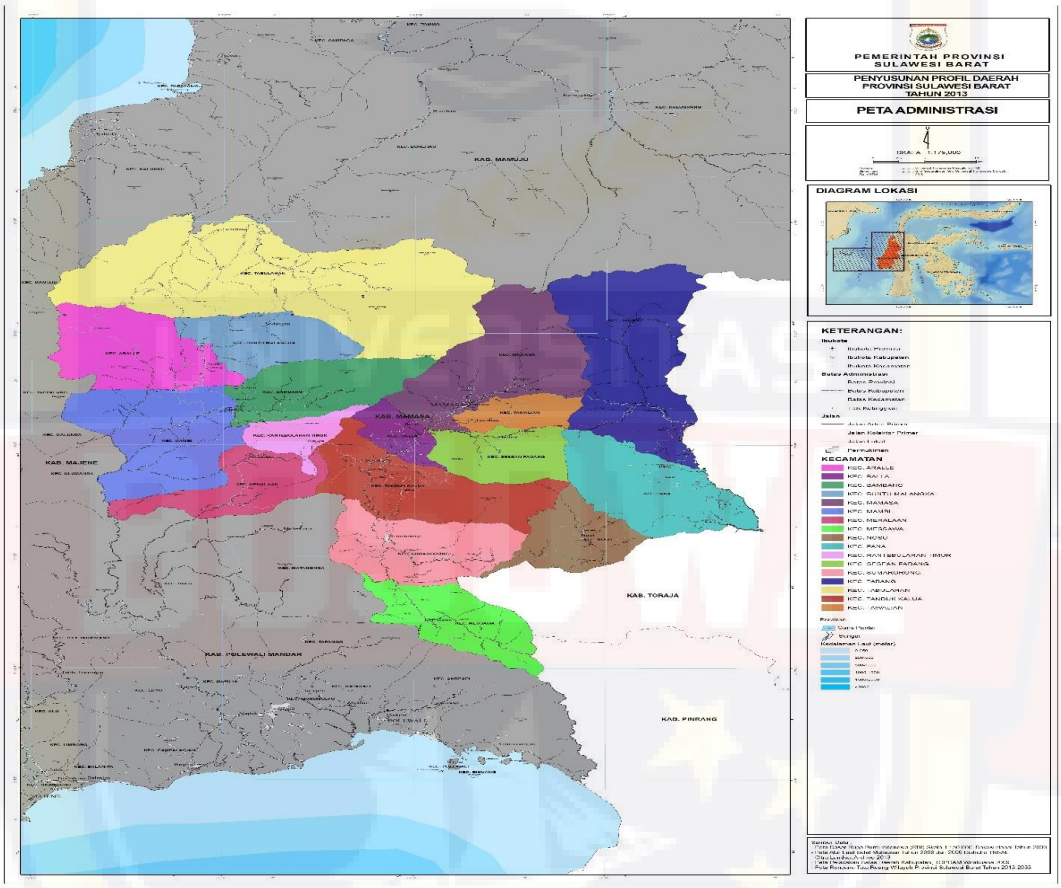


*Sumber: Perda RTRW Kabupaten Mamasa, Bappelitbangda, 2016*

### 4.1.2 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Mamasa

BPKD Kabupaten Mamasa merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki visi sebagai berikut :

*"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Yang Akuntable."*

Dalam pencapaian visinya, BPKD Kabupaten Mamasa memiliki Misi sebagai tahap-tahap/langkah-langkah yang akan dilaksanakan guna mencapai visi diatas:

- Mewujudkan Pengelolaan administrasi keuangan dan Asset yang tertib.
- Mewujudkan Pelayanan Prima

Tujuan dan Sasaran BPKD Kabupaten Mamasa adalah: Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dibidang keuangan dan asset daerah serta penyediaan secara kualitas prasarana untuk mengoptimalisasi pelayanan .

Sasaran (program, kebijakan, kegiatan) BPKD Kabupaten Mamasa:

a. Terwujudnya SDM pengelolaan keuangan dan Asset Daerah yang berkualitas.
b. Terlaksananya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan keuangan daerah.
c. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.
d. Tersusunnya penerbitan administrasi asset.
e. Terlaksananya pelayanan publik dan administrasi perkantoran yang prima.
f. Terlaksananya sistem informasi manajemen yang terintergerasi.
g. Terlaksananya kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM dalam bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah, serta Penyediaan sarana dan prasarana untuk penunjang operasional penerimaan pendapatan daerah, yang dilaksanakan dengan program:

1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat untuk operasional Pendapatan Daerah;
2. Pendidikan dan Pelatihan, serta pengembangan SDM aparatur bidang Pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset Daerah guna peningkatan kualitas pelayanan masyarakat;
3. standarisasi pelayanan.

h. Terencananya pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rutin untuk keperluan operasional administrasi umum.

i. Terpeliharanya dan terinventarisirnya peralatan kantor dengan baik.

**Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat**

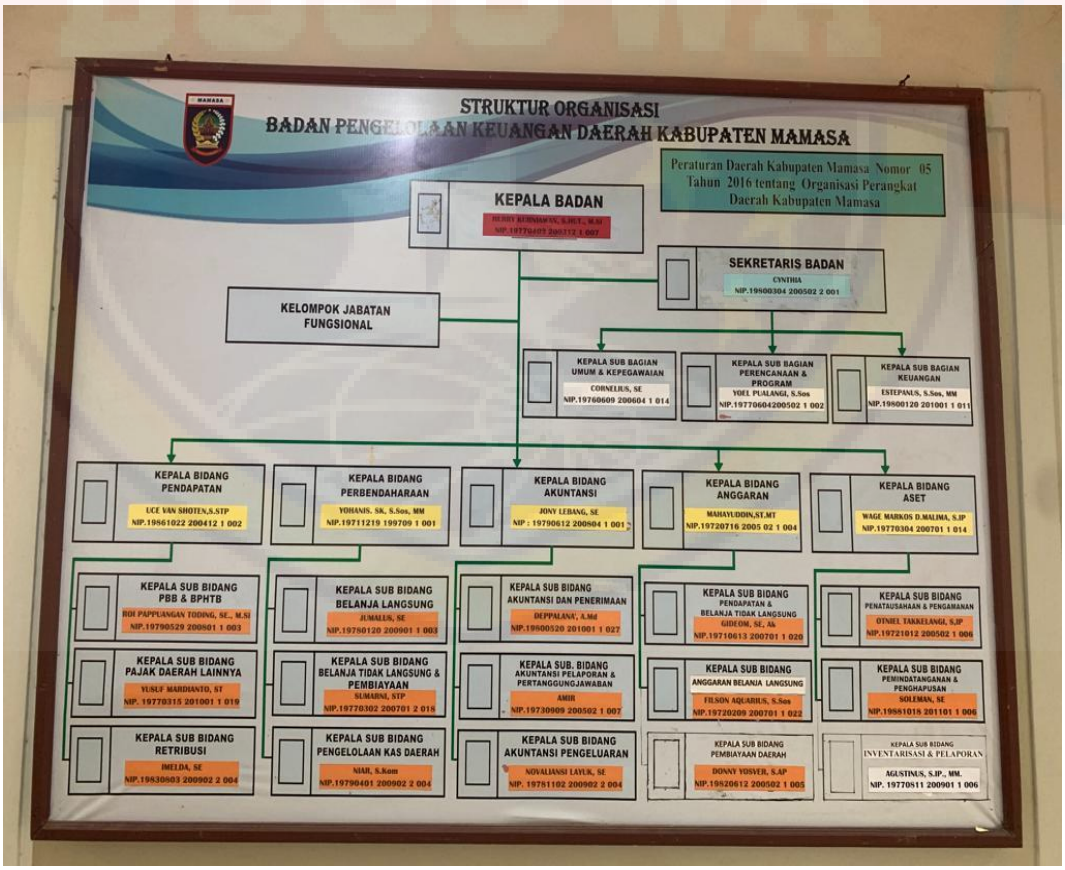

1. **Struktur Organisasi**

**a. KEPALA BADAN**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta mempunyai tugas pokok merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan urusan Pemerintaan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Rincian tugas Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

1. Merumuskan, mengarahkan dan menyelenggarakan rencanan strategik dan program kerja Dinas Sesuai dengan visi misi Daerah;
2. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja Dinas sesuai Bidang tugasnya;
3. Mengarahkan, Merumuskan program kerja dan menetapkan kebijakan operasional di bidang Pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Mengkoordinasikan penyusunan dan pedoman pelaksanaan kebijakan keuangan Daerah;
5. Mengkoordinasikan perumusan dan penyelenggaraan rencana strategik dan program kerja bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

6. Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD;
7. Perumusan standar, norma, pedoman, prosedur penyusunan dan pelaksanaan APBD;
8. Melaksanakan fungsi bendaharawan umum Daerah (BUD) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Mengkoordinasikan penyusunan laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
10. Menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
11. Mengorganisir kegiatan SKPD berdasarkan sistem dan prosedur kerja untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
12. Mengendalikan pelaksanaan tugas SKPD secara terpadu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
13. Membina pelaksanaan kegiatan SKPD secara menyeluruh untuk kelancaran tugas;
14. Mendistribusikan tugas sesuai bidang masing-masing untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
15. Mengawasi pelaksanaan tugas baik intern maupun ekstern secara berkala untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan SKPD;

16. Mengevaluasi seluruh kegiatan SKPD secara terpadu untuk mengetahui perkembangan dan pelaksanaan tugas;
17. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
18. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat;
19. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
20. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan bidang tugas dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
21. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
22. Menilai pelaksanaan program kerja (Waskat), mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

**b. SEKRETARIS BADAN**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, serta mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas Kesekretariatan meliputi Umum dan Kepegawaian, program dan Pelaporan, Keuangan, serta pemberian pelayanan

Administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkup Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Rincian tugas Sekretaris sebagai berikut :

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan di bidang umum dan Kepegawaian, program dan pelaporan serta Keuangan;
2. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas umum dan Kepegawaian;
4. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas program dan pelaporan;
5. Mengelola dan mengkoordinasikam pelaksanaan tugas Keuangan;
6. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan dan Aset;
7. Melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas Administrasi Umum dan Kepegawaian, program dan pelaporan, Perlengkapan dan Aset;
8. Mengkoordinasikan dan mengelola pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh Satuan Unit organisasi dalam lingkup dinas;
9. Mengkoordinasikan dan mengelola penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Dinas;

10. Mengkoordinasikan tugas dengan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
11. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
12. Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.

**1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan, serta mempunyai Tugas Pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas rumah tangga, Surat- menyurat, Kearsipan, Protokol, Perjalanan Dinas, Tata Laksana, Perlengkapan dan Aset, Kepegawaian dan tugas Umum lainnya, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian.

**2. Sub Bagian program dan pelaporan**

Sub Bagian program dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan, serta mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas program pelaporan meliputi penyusunan program/kegiatan jadwal

pelaksanaan kegiatan, penyusunan laporan dan tugas lainnya, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Administrasi Program dan Pelaporan.

**3. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan, serta mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas Keuangan meliputi penyusunan anggaran, perifikasi, perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan anggaran, dan tugas Keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi Keuangan.

**c. KEPALA BIDANG ANGGARAN**

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, serta mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran pendapatan, Anggaran belanja dan Anggaran pembiayaan.

Rincian tugas Kepala Bidang Anggaran sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja Bidang anggaran dan pembiayaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
4. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naska Dinas untuk menghindari kesalahan;
5. Melaksanakan koordinasi kegiatan, agar terjadi kerja sama yang saling mendukung dalam mencapai sasaran;
6. Mempersiapkan analisis standar biaya, standar harga barang/jasa dan pedoman menyusun APBD dan perubahan APBD;
7. Menghimpun rencana kerja dan anggaran melalui suatu kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
8. Mengelola dan menganalisa data perencanaan anggaran SKPD berdasarkan skala prioritas untuk pengalokasian anggaran SKPD;
9. Melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Perubahan APBD berdasarkan usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan pengkajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

10. Mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bahan pertimbangan Panitia Anggaran untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Menyusun penjabaran Anggaran berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati;
12. Melakukan penelitian dan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan untuk tertib administrasi keuangan;
13. Menyiapkan anggaran kas dan meneliti kebenaran penerbitan konsep naska Surat Penyediaan Dana (SPD);
14. Melakukan pengujian ketersediaan dana melalui Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA) untuk tertib pelaksanaan anggaran;
15. Mengkoordinasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk;
16. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sekretaris dan Kepala-kepala Bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
17. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai uraian tugas untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
18. Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya pemecahannya;

19. Menilai prestasi dan semangat pengabdian bawahan sesuai ketentuan dengan hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
20. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan pertanggungjawaban dan evaluasi;

**1. Seksi Belanja Langsung dan Tidak Langsung**

Seksi Belanja Langsung dan Tidak Langsung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Anggaran, serta mempunyai tugas pokok merencanakan/mengatur dan mempersiapkan serta menyusun anggaran dan pengelolaan belanja langsung dan tidak langsung.

**2. Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan**

Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Anggaran, serta mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur dan mempersiapkan serta menyusun anggaran dan pengelolaan belanja langsung dan tidak langsung.

**d. BIDANG PERBENDAHARAAN**

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, serta mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memberikan

pelayanan administratif, Perencanaan, Pengaturan dan penyusunan proses pencairan dana.

Rincian tugas Kepala Perbendaharaan sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja Bidang Perbendaharaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
4. Membuat konsep, mengoreksi dan memarap naska Dinas untuk menghindari kesalahan;
5. Melakukan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan SPM yang diajukan oleh setiap SKPD;
6. Menerbitkan SP2D;
7. Mengirim SP2D kepada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai Bank tempat menyimpan Kas Daerah;
8. Membuat register surat penolakan penerbitan SP2D;
9. Menyimpan uang Daerah di Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
10. Melaksanakan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;

11. Melaksanakan pengelolaan Kas Non anggaran yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Daerah;
12. Mengusahakan dan mengatur Dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
13. Melakukan koordinasi yang diperlukan oleh Instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
14. Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya pemecahannya;
15. Menilai prestasi dan semangat pengabdian bawahan sesuai hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
16. Menusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan sebagai bahan pertanggungjawaban dan atau bahan evaluasi.

**1. Seksi Pengelolaan Belanja Pegawai**

Seksi Pengelolaan Belanja Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan, serta mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur dan mempersiapkan penerbitan SP2D pengelolaan belanja pegawai.

**2. Seksi Pengelolaan Belanja Non Pegawai**

Seksi Pengelolaan Belanja Non Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Bidang Perbendaharaan, serta mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur dan mempersiapkan penerbitan SP2D Pengelolaan Belanja Non Pegawai.

**e. BIDANG ASET**

Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, serta mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, menyeliah, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Aset Daerah.

Rincian tugas Kepala Bidang Aset sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja pengelolaan Aset Daerah sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit kerja;
2. Membagi dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas-tugas tertentu kepada bawahan;
3. Menghimpun, mengelola dan menginventarisir data aset daerah sesuai jenisnya untuk mengetahui jumlah kekayaan daerah;
4. Mengelola aset daerah sesuai dengan fungsinya untuk dimanfaatkan secara berdayaguna dan berhasil guna;
5. Menyelenggarakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pendistribusian dan penghapusan aset daerah sesuai ketentuan yang ada;

6. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan aset daearh dan menyiapkan bahan/petunjuk pemecahan masalahnya;
7. Merencanakan, mengadakan dan memelihara lampu jalan;
8. Menyusun neraca kekayaan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui jumlah kekayaan daerah;
9. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
10. Menkonsultasikan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk;
11. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
12. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sekretaris dan Kepala-kepala Bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyetuan pendapat.

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Mamasa

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan perbandingan antara anggaran dan realisasinya, yang meliputi unsur-unsur Pendapatan LRA dan Belanja Daerah selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Sebagaimana dapat dilihat pada laporan berikut ini :

**Gambar4.3**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

*periode 1 January s.d 31 December 2021*

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | LEBIH / (KURANG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | s/d PERIODE LALU | PERIODE INI | TOTAL | |
| 4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 904.871.875.108,00 | 0,00 | 899.975.331.832,36 | 899.975.331.832,36 | (4.896.543.275,64) |
| 4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 23.343.161.766,04 | 0,00 | 16.643.739.465,36 | 16.643.739.465,36 | (6.699.422.300,68) |
| 4.1.1 | **Pajak Daerah** | 5.411.941.725,87 | 0,00 | 4.297.034.538,00 | 4.297.034.538,00 | (1.114.907.187,87) |
| 4.1.1.06 | Pajak Hotel | 865.700.238,00 | 0,00 | 26.512.000,00 | 26.512.000,00 | (839.188.238,00) |
| 4.1.1.07 | Pajak Restoran | 968.989.794,39 | 0,00 | 1.537.913.280,00 | 1.537.913.280,00 | 568.923.485,61 |
| 4.1.1.08 | Pajak Hiburan | 6.460.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | (4.460.000,00) |
| 4.1.1.09 | Pajak Reklame | 131.509.306,00 | 0,00 | 263.960.550,00 | 263.960.550,00 | 132.451.244,00 |
| 4.1.1.10 | Pajak Penerangan Jalan | 1.451.236.570,80 | 0,00 | 1.679.928.816,00 | 1.679.928.816,00 | 228.692.245,20 |
| 4.1.1.14 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 1.916.711.551,68 | 0,00 | 354.244.462,00 | 354.244.462,00 | (1.562.467.089,68) |
| 4.1.1.15 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 0,00 | 0,00 | 284.281.520,00 | 284.281.520,00 | 284.281.520,00 |
| 4.1.1.16 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 71.334.265,00 | 0,00 | 148.193.910,00 | 148.193.910,00 | 76.859.645,00 |
| 4.1.2 | **Retribusi Daerah** | 4.099.289.064,00 | 0,00 | 5.269.398.711,00 | 5.269.398.711,00 | 1.170.109.647,00 |
| 4.1.2.01 | Retribusi Jasa Umum | 3.663.793.871,20 | 0,00 | 5.016.477.642,00 | 5.016.477.642,00 | 1.352.683.770,80 |
| 4.1.2.02 | Retribusi Jasa Usaha | 341.670.000,00 | 0,00 | 94.485.100,00 | 94.485.100,00 | (247.184.900,00) |
| 4.1.2.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 93.825.192,80 | 0,00 | 158.435.969,00 | 158.435.969,00 | 64.610.776,20 |
| 4.1.3 | **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** | 3.684.792.054,00 | 0,00 | 2.805.366.949,00 | 2.805.366.949,00 | (879.425.105,00) |
| 4.1.3.02 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD | 3.684.792.054,00 | 0,00 | 2.805.366.949,00 | 2.805.366.949,00 | (879.425.105,00) |
| 4.1.4 | **Lain-lain PAD yang Sah** | 10.147.138.922,17 | 0,00 | 4.271.939.267,36 | 4.271.939.267,36 | (5.875.199.654,81) |
| 4.1.4.01 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 529.379.301,05 | 0,00 | 192.719.300,00 | 192.719.300,00 | (336.660.001,05) |
| 4.1.4.03 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 810.000.000,00 | 0,00 | 237.703.572,00 | 237.703.572,00 | (572.296.428,00) |
| 4.1.4.04 | Hasil Kerja Sama Daerah | 0,00 | 0,00 | 340.128.320,00 | 340.128.320,00 | 340.128.320,00 |
| 4.1.4.05 | Jasa Giro | 3.118.414.231,90 | 0,00 | 722.258.363,00 | 722.258.363,00 | (2.396.155.868,90) |
| 4.1.4.08 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 490.280.001,24 | 0,00 | 1.770.676.122,00 | 1.770.676.122,00 | 1.280.396.120,76 |
| 4.1.4.11 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 2.068.524.691,67 | 0,00 | 11.367.385,40 | 11.367.385,40 | (2.057.157.306,27) |
| 4.1.4.12 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 4.290.086,24 | 0,00 | 19.144.903,96 | 19.144.903,96 | 14.854.817,72 |
| 4.1.4.15 | Pendapatan dari Pengembalian | 414.671.298,74 | 0,00 | 951.468.681,00 | 951.468.681,00 | 536.797.382,26 |
| 4.1.4.18 | Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) | 2.711.579.311,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.711.579.311,33) |
| 4.1.4.23 | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA | 0,00 | 0,00 | 26.472.620,00 | 26.472.620,00 | 26.472.620,00 |
| 4.2 | **PENDAPATAN TRANSFER** | 834.188.975.341,96 | 0,00 | 835.926.966.928,00 | 835.926.966.928,00 | 1.737.991.586,04 |
| 4.2.1 | **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat** | 819.460.927.000,00 | 0,00 | 820.332.812.926,00 | 820.332.812.926,00 | 871.885.926,00 |
| 4.2.1.01 | Dana Perimbangan | 665.434.719.000,00 | 0,00 | 666.415.280.926,00 | 666.415.280.926,00 | 980.561.926,00 |

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH — Halaman 1 dari 4

Printed By SimBD

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | LEBIH / (KURANG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | s/d PERIODE LALU | PERIODE INI | TOTAL | |
| 4.2.1.02 | Dana Insentif Daerah (DID) | 7.148.713.000,00 | 0,00 | 7.148.713.000,00 | 7.148.713.000,00 | 0,00 |
| 4.2.1.05 | Dana Desa | 146.877.495.000,00 | 0,00 | 146.768.819.000,00 | 146.768.819.000,00 | (108.676.000,00) |
| 4.2.2 | **Pendapatan Transfer Antar Daerah** | 14.728.048.341,96 | 0,00 | 15.594.154.002,00 | 15.594.154.002,00 | 866.105.660,04 |
| 4.2.2.01 | Pendapatan Bagi Hasil | 14.728.048.341,96 | 0,00 | 15.594.154.002,00 | 15.594.154.002,00 | 866.105.660,04 |
| 4.2.2.02 | Bantuan Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | 47.339.738.000,00 | 0,00 | 47.404.625.439,00 | 47.404.625.439,00 | 64.887.439,00 |
| 4.3.1 | **Pendapatan Hibah** | 18.235.508.000,00 | 0,00 | 16.642.034.700,00 | 16.642.034.700,00 | (1.593.473.300,00) |
| 4.3.1.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 18.235.508.000,00 | 0,00 | 16.642.034.700,00 | 16.642.034.700,00 | (1.593.473.300,00) |
| 4.3.3 | **Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan** | 29.104.230.000,00 | 0,00 | 30.762.590.739,00 | 30.762.590.739,00 | 1.658.360.739,00 |
| 4.3.3.01 | Lain-lain Pendapatan | 29.104.230.000,00 | 0,00 | 30.762.590.739,00 | 30.762.590.739,00 | 1.658.360.739,00 |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | 1.053.665.638.363,00 | 0,00 | 925.410.149.297,76 | 925.410.149.297,76 | (128.255.489.065,24) |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | 634.879.289.575,00 | 0,00 | 605.452.809.449,60 | 605.452.809.449,60 | (29.426.480.125,40) |
| 5.1.1 | **Belanja Pegawai** | 356.455.894.358,00 | 0,00 | 343.021.980.654,00 | 343.021.980.654,00 | (13.433.913.704,00) |
| 5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 278.762.421.245,00 | 0,00 | 275.421.753.194,00 | 275.421.753.194,00 | (3.340.668.051,00) |
| 5.1.1.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 8.572.452.240,00 | 0,00 | 7.438.730.107,00 | 7.438.730.107,00 | (1.133.722.133,00) |
| 5.1.1.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 47.648.909.556,00 | 0,00 | 47.367.717.520,00 | 47.367.717.520,00 | (281.192.036,00) |
| 5.1.1.04 | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 12.964.518.800,00 | 0,00 | 12.152.897.330,00 | 12.152.897.330,00 | (811.621.470,00) |
| 5.1.1.05 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 163.667.017,00 | 0,00 | 139.282.503,00 | 139.282.503,00 | (24.384.514,00) |
| 5.1.1.06 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 501.600.000,00 | 0,00 | 501.600.000,00 | 501.600.000,00 | 0,00 |
| 5.1.1.88 | Belanja Pegawai BOS | 7.842.325.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (7.842.325.500,00) |
| 5.1.2 | **Belanja Barang dan Jasa** | 222.300.792.502,00 | 0,00 | 212.210.411.935,60 | 212.210.411.935,60 | (10.090.380.566,40) |
| 5.1.2.01 | Belanja Barang | 67.457.547.322,00 | 0,00 | 57.815.919.407,00 | 57.815.919.407,00 | (9.641.627.915,00) |
| 5.1.2.02 | Belanja Jasa | 96.184.175.825,00 | 0,00 | 80.764.233.975,60 | 80.764.233.975,60 | (15.419.941.849,40) |
| 5.1.2.03 | Belanja Pemeliharaan | 7.470.165.740,00 | 0,00 | 6.927.319.211,00 | 6.927.319.211,00 | (542.846.529,00) |
| 5.1.2.04 | Belana Perjalanan Dinas | 40.980.186.915,00 | 0,00 | 38.569.495.937,00 | 38.569.495.937,00 | (2.410.690.978,00) |
| 5.1.2.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 2.810.700.000,00 | 0,00 | 2.641.300.000,00 | 2.641.300.000,00 | (169.400.000,00) |
| 5.1.2.88 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 7.398.016.700,00 | 0,00 | 25.492.143.405,00 | 25.492.143.405,00 | 18.094.126.705,00 |
| 5.1.3 | **Belanja Bunga** | 1.208.645.000,00 | 0,00 | 227.059.000,00 | 227.059.000,00 | (981.586.000,00) |
| 5.1.3.04 | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) | 1.208.645.000,00 | 0,00 | 227.059.000,00 | 227.059.000,00 | (981.586.000,00) |
| 5.1.5 | **Belanja Hibah** | 53.466.757.715,00 | 0,00 | 48.557.657.860,00 | 48.557.657.860,00 | (4.909.099.855,00) |
| 5.1.5.02 | Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya | 35.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.5.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 52.793.140.715,00 | 0,00 | 47.884.040.860,00 | 47.884.040.860,00 | (4.909.099.855,00) |
| 5.1.5.07 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 638.617.000,00 | 0,00 | 638.617.000,00 | 638.617.000,00 | 0,00 |



Printed By SimDa

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | LEBIH / (KURANG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | s/d PERIODE LALU | PERIODE INI | TOTAL | |
| 5.1.6 | **Belanja Bantuan Sosial** | 1.447.200.000,00 | 0,00 | 1.435.700.000,00 | 1.435.700.000,00 | (11.500.000,00) |
| 5.1.6.01 | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu | 1.406.200.000,00 | 0,00 | 1.394.700.000,00 | 1.394.700.000,00 | (11.500.000,00) |
| 5.1.6.02 | Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.6.03 | Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2 | **BELANJA MODAL** | 185.066.161.088,00 | 0,00 | 96.750.682.097,94 | 96.750.682.097,94 | (88.315.478.990,06) |
| 5.2.1 | **Belanja Modal Tanah** | 10.030.453.800,00 | 0,00 | 6.775.000.000,00 | 6.775.000.000,00 | (3.255.453.800,00) |
| 5.2.1.01 | Belanja Modal Tanah | 10.030.453.800,00 | 0,00 | 6.775.000.000,00 | 6.775.000.000,00 | (3.255.453.800,00) |
| 5.2.2 | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | 24.334.288.622,00 | 0,00 | 17.859.059.445,00 | 17.859.059.445,00 | (6.475.229.177,00) |
| 5.2.2.01 | Belanja Modal Alat Besar | 1.200.000.000,00 | 0,00 | 1.114.678.989,00 | 1.114.678.989,00 | (85.321.011,00) |
| 5.2.2.02 | Belanja Modal Alat Angkutan | 706.441.717,00 | 0,00 | 445.394.500,00 | 445.394.500,00 | (261.047.217,00) |
| 5.2.2.04 | Belanja Modal Alat Pertanian | 106.230.000,00 | 0,00 | 106.230.000,00 | 106.230.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 3.359.463.203,00 | 0,00 | 3.303.862.774,00 | 3.303.862.774,00 | (55.600.429,00) |
| 5.2.2.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 61.302.499,00 | 0,00 | 52.801.200,00 | 52.801.200,00 | (8.501.299,00) |
| 5.2.2.07 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 6.972.271.364,00 | 0,00 | 6.553.518.468,00 | 6.553.518.468,00 | (418.752.896,00) |
| 5.2.2.08 | Belanja Modal Alat Laboratorium | 2.314.652.000,00 | 0,00 | 2.098.438.069,00 | 2.098.438.069,00 | (216.213.931,00) |
| 5.2.2.10 | Belanja Modal Komputer | 2.810.236.639,00 | 0,00 | 2.259.358.512,00 | 2.259.358.512,00 | (550.878.127,00) |
| 5.2.2.16 | Belanja Modal Alat Peraga | 415.000.000,00 | 0,00 | 389.950.000,00 | 389.950.000,00 | (25.050.000,00) |
| 5.2.2.19 | Belanja Modal Peralatan Olahraga | 21.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (21.750.000,00) |
| 5.2.2.88 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 6.366.941.200,00 | 0,00 | 1.534.826.933,00 | 1.534.826.933,00 | (4.832.114.267,00) |
| 5.2.3 | **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** | 17.319.402.914,00 | 0,00 | 13.422.080.476,00 | 13.422.080.476,00 | (3.897.322.438,00) |
| 5.2.3.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | 17.312.492.264,00 | 0,00 | 13.415.169.826,00 | 13.415.169.826,00 | (3.897.322.438,00) |
| 5.2.3.02 | Belanja Modal Monumen | 6.910.650,00 | 0,00 | 6.910.650,00 | 6.910.650,00 | 0,00 |
| 5.2.4 | **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | 91.785.421.502,00 | 0,00 | 25.321.000.493,94 | 25.321.000.493,94 | (66.464.421.008,06) |
| 5.2.4.01 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan | 69.990.588.986,00 | 0,00 | 14.156.136.935,60 | 14.156.136.935,60 | (55.834.452.050,40) |
| 5.2.4.02 | Belanja Modal Bangunan Air | 17.617.962.516,00 | 0,00 | 7.106.994.558,34 | 7.106.994.558,34 | (10.510.967.957,66) |
| 5.2.4.03 | Belanja Modal Instalasi | 36.870.000,00 | 0,00 | 36.869.000,00 | 36.869.000,00 | (1.000,00) |
| 5.2.4.04 | Belanja Modal Jaringan | 4.140.000.000,00 | 0,00 | 4.021.000.000,00 | 4.021.000.000,00 | (119.000.000,00) |
| 5.2.5 | **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya** | 41.596.594.250,00 | 0,00 | 33.373.541.683,00 | 33.373.541.683,00 | (8.223.052.567,00) |
| 5.2.5.07 | Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi | 34.099.647.650,00 | 0,00 | 28.927.432.174,00 | 28.927.432.174,00 | (5.172.215.476,00) |
| 5.2.5.88 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 7.496.946.600,00 | 0,00 | 4.446.109.509,00 | 4.446.109.509,00 | (3.050.837.091,00) |
| 5.3 | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | 22.600.000.000,00 | 0,00 | 22.599.059.550,22 | 22.599.059.550,22 | (940.449,78) |
| 5.3.1 | **Belanja Tidak Terduga** | 22.600.000.000,00 | 0,00 | 22.599.059.550,22 | 22.599.059.550,22 | (940.449,78) |
| 5.3.1.01 | Belanja Tidak Terduga | 22.600.000.000,00 | 0,00 | 22.599.059.550,22 | 22.599.059.550,22 | (940.449,78) |
| 5.4 | **BELANJA TRANSFER** | 211.120.187.700,00 | 0,00 | 200.607.598.200,00 | 200.607.598.200,00 | (10.512.589.500,00) |
| 5.4.2 | **Belanja Bantuan Keuangan** | 211.120.187.700,00 | 0,00 | 200.607.598.200,00 | 200.607.598.200,00 | (10.512.589.500,00) |



Printed By SimDa

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | LEBIH / (KURANG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | s/d PERIODE LALU | PERIODE INI | TOTAL | |
| 5.4.2.05 | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 211.120.187.700,00 | 0,00 | 200.607.598.200,00 | 200.607.598.200,00 | (10.512.589.500,00) |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (148.793.763.255,00) | 0,00 | (25.434.817.465,40) | (25.434.817.465,40) | 123.358.945.789,60 |
| 6.1 | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | 151.293.763.255,00 | 0,00 | 28.182.347.784,06 | 28.182.347.784,06 | (123.111.415.470,94) |
| 6.1.1 | **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya** | 3.719.763.128,00 | 0,00 | 3.732.347.784,06 | 3.732.347.784,06 | 12.584.656,06 |
| 6.1.1.01 | Pelampauan Penerimaan PAD | 184.348.929,00 | 0,00 | 184.348.929,00 | 184.348.929,00 | 0,00 |
| 6.1.1.05 | Penghematan Belanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1.07 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | 2.107.468.486,00 | 0,00 | 2.107.468.485,06 | 2.107.468.485,06 | (0,94) |
| 6.1.1.08 | Sisa Belanja Lainnya | 1.427.945.713,00 | 0,00 | 1.427.945.713,00 | 1.427.945.713,00 | 0,00 |
| 6.1.1.99 | Koreksi SILPA | 0,00 | 0,00 | 12.584.657,00 | 12.584.657,00 | 12.584.657,00 |
| 6.1.4 | **Penerimaan Pinjaman Daerah** | 147.574.000.127,00 | 0,00 | 24.450.000.000,00 | 24.450.000.000,00 | (123.124.000.127,00) |
| 6.1.4.04 | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) | 147.574.000.127,00 | 0,00 | 24.450.000.000,00 | 24.450.000.000,00 | (123.124.000.127,00) |
| 6.2 | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | (1.000.000.000,00) |
| 6.2.1 | **Pembentukan Dana Cadangan** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.01 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2 | **Penyertaan Modal Daerah** | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | (1.000.000.000,00) |
| 6.2.2.02 | Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | (1.000.000.000,00) |
| 6.2.3 | **Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3.03 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | 148.793.763.255,00 | 0,00 | 26.682.347.784,06 | 26.682.347.784,06 | (122.111.415.470,94) |
| | **SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | 0,00 | 0,00 | 1.247.530.318,66 | 1.247.530.318,66 | 1.247.530.318,67 |

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH — Halaman 4 dari 4

Berdasarkan gambar 4.3 diatas yakni laporan realisasi anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah pada TA 2021 sebesar Rp. 899.975.331.832,36 atau mencapai 99,45% dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp.904.871.875.108,00. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang bertujuan untuk mendanai perealisasian otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kabupaten Mamasa terdiri dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada TA 2021 sebesar Rp. 16.643.739.465,36 atau mencapai 71,3% dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp. 23.343.161.766,04.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Transfer di Pemerintah Kabupaten Mamasa terdiri dari :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Pendapatan Transfer pada TA 2021 sebesar Rp. 835.926.966.928,00 atau mencapai 101,02% dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp. 834.188.975.341,96.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada TA 2021 sebesar Rp. 47.404.625.439 atau mencapai 100,01% dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp. 47.339.738.000,00. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dibagi menjadi 2 yaitu Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan data laporan realisasi anggaran menunjukkan bahwa pendapatan yang paling tinggi diperoleh oleh dinas BPKD selama tahun 2021 terdapat pada Pendapatan Transfer yakni sebesar 101,02%. Sedangkan, pendapatan yang paling rendah diperoleh oleh dinas BPKD selama tahun 2021 terdapat pada Pendapatan Asli Daerah yakni sebesar 71,3%. Hal ini menunjukkan bahwa dinas BPKD selama tahun 2021 banyak melakukan pengembangan dan peningkatan desa salah satunya diantara Pendapatan Transfer lainnya yang ada. Artinya anggaran yang direncanakan benar-benar direalisasikan sehingga pemerintah tidak tanggung-tanggung memperoleh pendapatan transfer lebih dari 100% sesuai dengan data yang ada. Sementara untuk Pendapatan Asli Daerah masih dikategorikan rata-rata normal pendapatannya. Artinya bukan berarti dengan nilai persentase dibawah dari 100%, pemerintah mengalami kerugian. Namun masih tetap dalam nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah yang sama dari tahun ke tahun.

Selain pendapatan yang diperoleh oleh BPKD dalam LRA-nya juga menampilkan rincian pengeluaran segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan disebut dengan Belanja Daerah. Sebagaimana Realisasi Belanja Daerah di

Pemerintah Kabupaten Mamasa pada TA 2021 sebesar Rp. 925.410.149.297,76 atau mencapai 87,82% dari estimasi Belanja LRA sebesar Rp. 1.053.665.638.363,00. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah belanja yang dilakukan untuk kegiatan operasional yang ada di pemerintahan atau perusahaan. Belanja Operasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Mamasa dibagi menjadi 5 yaitu :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Bunga
4. Belanja Hibah
5. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Operasi pada TA 2021 sebesar Rp. 605.452.809.449,60 atau mencapai 95,36% dari estimasi anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 634.879.289.575,00.

b. Belanja Modal di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa terdiri atas :

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal pada TA 2021 sebesar Rp. 96.750.682.097,94 atau mencapai 52,27% dari estimasi anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 185.066.161.088,00.

c. Belanja Tidak Terduga, adalah belanja yang dapat dilakukan sewaktu-waktu terkait keperluan lainnya yang dibutuhkan perusahaan atau pemerintahan.

Realisasi Belanja Tidak Terduga pada TA 2021 sebesar Rp. 22.599.059.550,22 atau mencapai 99,99% dari estimasi anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 22.600.000.000,00.

d. Belanja Transfer, merupakan belanja yang dilakukan untuk di kirim sebagai bantuan kepada daerah atau desa yang ada di Kabupaten Mamasa.

Realisasi Belanja Transfer pada TA 2021 sebesar Rp. 200.607.598.200,00 atau mencapai 95,02% dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp. 211.120.187.700,00.

Berdasarkan data laporan realisasi anggaran menunjukkan bahwa belanja yang paling tinggi dilakukan oleh dinas BPKD selama tahun 2021 terdapat pada Belanja Tidak Terduga yakni sebesar 99,99%. Sedangkan, belanja yang paling rendah dilakukan oleh dinas BPKD selama tahun 2021 terdapat pada Belanja

Modal yakni sebesar 52,27%. Hal ini menunjukkan bahwa dinas BPKD selama tahun 2021 banyak melakukan pengembangan dan peningkatan desa salah satunya diantara Belanja Tidak Terduga lainnya yang ada. Artinya anggaran yang direncanakan benar-benar direalisasikan sehingga pemerintah tidak tanggung-tanggung melakukan belanja tidak terduga hampir mencapai 100% sesuai dengan data yang ada. Sementara untuk Belanja Operasi dan Belanja Transfer masih dikategorikan rata-rata normal pendapatannya karena persentasenya hampir sama dengan Belanja Tidak Terduga yakni 95,36% untuk Belanja Operasi dan 95,02% untuk Belanja Transfer. Artinya bukan berarti dengan nilai persentase dibawah dari 100%, pemerintah mengalami kerugian. Namun masih tetap dalam nilai rata-rata Belanja Daerah yang sama dari tahun ke tahun.

### 4.2.2 Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamasa

Neraca merupakan salah satu bagian dari komponen laporan keuangan dimana laporan neraca inilah yang menjadi penentu akhir untuk melihat keadaan atau kondisi keuangan perusahaan baik dari segi nilai nominal maupun yang dalam berbentuk non nominal di akhir tahun atau periode per 31 desember sebagaimana dalam neraca menampilkan mengenai ekuitas, asset dan kewajiban. Sebagaimana dapat dilihat salah satu contoh yang terdapat pada laporan neraca yang ada di BPKD Mamasa untuk periode 31 desember 2021 sebagai berikut :

# NERACA

**PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA**

Per 31 December 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| **ASET** | | |
| ASET LANCAR | | |
| Kas di Kas Daerah | 229.594.272,10 | 1.492.017.659,90 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 27.743.724,00 | 13.167.500,00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 362.387.280,00 | 880.706.534,00 |
| Kas di BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Kas Dana BOS | 751.671.102,00 | 1.427.945.713,00 |
| Kas Dana Kapitasi pada FKTP | 50.516.415,56 | 184.348.928,16 |
| Kas Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Setara Kas | 0,00 | 0,00 |
| Investasi Jangka Pendek | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Pajak Daerah | 4.471.173.137,00 | 3.682.987.643,00 |
| Piutang Retribusi Daerah | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 28.003.969,00 | 28.003.969,00 |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat | 29.539.000,00 | 29.539.000,00 |
| Piutang Transfer Antar Daerah | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Lainnya | 1.007.128.559,74 | 1.125.789.374,46 |
| Penyisihan Piutang | (3.257.964.345,01) | (3.054.555.911,40) |
| Beban Dibayar Dimuka | 0,00 | 0,00 |
| Persediaan | 2.996.384.573,30 | 5.598.064.760,66 |
| JUMLAH ASET LANCAR | 6.696.177.687,69 | 11.408.015.170,78 |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | | |
| Investasi Jangka Panjang Non Permanen | | |
| Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara | 0,00 | 0,00 |
| Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah | 0,00 | 0,00 |
| Investasi dalam Obligasi | 0,00 | 0,00 |
| Investasi dalam Proyek Pembangunan | 0,00 | 0,00 |
| Dana Bergulir | 71.100.000,00 | 71.100.000,00 |
| Deposito Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 |
| Investasi Non Permanen Lainnya | (71.100.000,00) | (71.100.000,00) |
| Investasi Permanen Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen | 0,00 | 0,00 |
| Investasi Jangka Panjang Permanen | | |
| Penyertaan Modal | 25.361.525.465,28 | 14.142.525.465,28 |
| Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen | 25.361.525.465,28 | 14.142.525.465,28 |
| JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG | 25.361.525.465,28 | 14.142.525.465,28 |
| ASET TETAP | | |
| Tanah | 170.268.086.038,46 | 147.514.332.138,46 |
| Peralatan dan Mesin | 283.259.565.202,94 | 268.982.469.148,45 |
| Gedung dan Bangunan | 576.577.056.445,15 | 494.497.058.623,27 |
| Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.152.390.230.934,19 | 1.131.115.265.648,64 |
| Aset Tetap Lainnya | 18.027.709.640,75 | 18.177.709.640,75 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 1.691.455.135,84 | 674.877.000,00 |
| Akumulasi Penyusutan | (775.557.024.312,08) | (698.962.591.489,33) |
| JUMLAH ASET TETAP | 1.426.657.079.085,25 | 1.361.999.120.710,24 |
| DANA CADANGAN | | |
| Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH DANA CADANGAN | 0,00 | 0,00 |
| ASET LAINNYA | | |
| Tagihan Jangka Panjang | 1.515.873.752,00 | 1.515.873.752,00 |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 |
| Aset Tidak Berwujud | 1.265.100.500,00 | 1.464.845.500,00 |
| Aset Lain-lain | 51.731.834.379,15 | 51.753.947.258,64 |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (1.245.154.300,00) | (1.424.953.100,00) |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH ASET LAINNYA | 53.267.654.331,15 | 53.309.713.410,64 |
| **JUMLAH ASET** | **1.511.982.436.569,37** | **1.440.859.374.756,94** |
| **KEWAJIBAN** | | |



Printed By SimDa

| URAIAN | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 174.382.475,00 | 278.423.208,00 |
| Utang Bunga | 0,00 | 0,00 |
| Utang Pinjaman Jangka Pendek | 0,00 | 0,00 |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 95.713.992,33 | 107.215.609,95 |
| Utang Belanja | 17.482.910.064,00 | 14.078.779.209,00 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 24.414.541.136,74 | 7.475.348.454,09 |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 42.167.547.668,07 | 21.939.766.481,04 |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | |
| Utang kepada Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 |
| Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) | 0,00 | 0,00 |
| Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank | 24.450.000.000,00 | 0,00 |
| Utang kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | 24.450.000.000,00 | 0,00 |
| **JUMLAH KEWAJIBAN** | **66.617.547.668,07** | **21.939.766.481,04** |
| **EKUITAS** | | |
| EKUITAS | 1.445.364.888.901,30 | 1.418.919.608.275,90 |
| **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA** | **1.511.982.436.569,37** | **1.440.859.374.756,94** |

Nilai Aset per 31 Desember 2021 disajikan sebesar Rp. 1.511.982.436.569,37 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 6.696.177.687,69, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp. 25.361.525.465,28, Aset Tetap sebesar Rp. 1.426.657.079.085,25 dan Aset Lainnya sebesar Rp. 53.267.654.331,15.

Aset Lancar di Pemerintah Kabupaten Mamasa terdiri dari :

1. Kas di Kas Daerah
2. Kas di Bendahara Penerimaan
3. Kas di Bendahara Pengeluaran
4. Kas di BLUD
5. Kas Dana BOS
6. Kas Dana Kapitasi pada FKTP
7. Kas Lainnya
8. Setara Kas

9. Investasi Jangka Pendek
10. Piutang Pajak Daerah
11. Piutang Retribusi Daerah
12. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
13. Piutang Lain-lain PAD yang Sah
14. Piutang Transfer Pemerintah Pusat
15. Piutang Transfer Antar Daerah
16. Piutang Lainnya
17. Penyisihan Piutang
18. Beban Dibayar Dimuka
19. Persediaan

Investasi Jangka Panjang di Pemerintah Kabupaten Mamasa dibagi menjadi 2 yaitu Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen terdiri dari :

1. Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
2. Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
3. Investasi dalam Obligasi
4. Investasi dalam Proyek Pembangunan
5. Dana Bergulir
6. Deposito Jangka Panjang
7. Investasi Non Permanen Lainnya
8. Investasi Permanen Lainnya

Sedangkan Investasi Jangka Panjang Permanen terdiri dari :

2. Penyertaan Modal, dan
3. Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah

Aset Tetap di Pemerintah Kabupaten Mamasa terdiri dari:

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
7. Akumulasi Penyusutan

Kemudian Aset Lainnya di Pemerintah Kabupaten Mamasa terdiri dari :

1. Tagihan Jangka Panjang
2. Kemitraan dengan Pihak
3. Aset Tidak Berwujud
4. Aset Lain-lain
5. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
6. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 66.617.547.668,07 yang terdiri dari : Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 42.167.547.668,07 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 24.450.000.000,00.

Kewajiban Jangka Pendek di Pemerintah Kabupaten Mamasa terdiri dari :

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2. Utang Bunga
3. Utang Pinjaman Jangka Pendek
4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
5. Pendapatan Diterima Dimuka
6. Utang Belanja
7. Utang Jangka Pendek Lainnya

Sedangkan untuk Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari :

1. Utang kepada Pemerintah Pusat
2. Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
3. Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
4. Utang kepada Masyarakat

Nilai Ekuitas di Pemerintah Kabupaten Mamasa per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.445.364.888.901,30.

## 4.3 Analisis Data Hasil Penelitian

### 4.3.1 Reduksi Data

Hasil penelitian di Pemerintah Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat menunjukkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas 2 yaitu LRA Pendapatan Daerah dan LRA Belanja Daerah.

Realisasi Pendapatan Daerah pada TA 2021 sebesar Rp. 899.975.331.832,36 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 904.871.875.108,00. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

1. Pendapatan Asli Daerah, dianggarkan sebesar Rp. 23.343.161.766,04 dan terealisasi sebesar Rp. 16.643.739.465,36 atau 71,3 persen dari anggaran yang ditetapkan.
2. Pendapatan Transfer, dianggarkan sebesar Rp. 834.188.975.341,96 dan terealisasi sebesar Rp. 835.926.966.928,00 atau 101,02 persen dari anggaran yang ditetapkan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dianggarkan sebesar Rp. 47.339.738.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 47.404.625.439 atau 100,01 persen dari anggaran yang ditetapkan.

Realisasi Belanja Daerah pada TA 2021 sebesar Rp. 925.410.149.297,76 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 1.053.665.638.363,00. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

1. Belanja Operasi, dianggarkan sebesar Rp. 634.879.289.575,00 dan terealisasi sebesar Rp. 605.452.809.449,60 atau 95,36 persen dari anggaran yang ditetapkan.
2. Belanja Modal, dianggarkan sebesar Rp. 185.066.161.088,00 dan terealisasi sebesar Rp. 96.750.682.097,94 atau 52,27 persen dari anggaran yang ditetapkan.
3. Belanja Tidak Terduga, dianggarkan sebesar Rp. 22.600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 22.599.059.550,22 atau 99,99 persen dari anggaran yang ditetapkan.

4. Belanja Transfer, dianggarkan sebesar Rp. 211.120.187.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 200.607.598.200,00 atau 95,02 persen dari anggaran yang ditetapkan.

Kemudian Neraca yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa terdiri atas Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

Jumlah Aset di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.511.982.436.569,37, yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 6.696.177.687,69, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp. 6.696.177.687,69, Aset Tetap sebesar Rp. 1.426.657.079.085,25 dan Aset Lainnya sebesar Rp. 53.267.654.331,15.

Jumlah Kewajiban di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa pada tahun 2021 sebesar Rp. 66.617.547.668,07 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 42.167.547.668,07 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 24.450.000.000,00.

Sedangkan jumlah Ekuitas di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.445.364.888.901,30.

### 4.3.2 Penyajian Data

Berikut hasil reduksi data dari LRA dan Neraca di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada tahun 2021 yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

**3.** Laporan Realisasi Anggaran

| No | LRA | Anggaran | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Daerah : | Rp.904.871.875.108,00 | Rp.899.975.331.832,36 | 99,45% |
| | a.Pendapatan Asli Daerah | Rp.23.343.161.766,04 | Rp.16.643.739.465,36 | 71,3 % |
| | b.Pendapatan Transfer | Rp.834.188.975.341,96 | Rp.835.926.966.928,00 | 101,02 % |
| | c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Rp.47.339.738.000,00 | Rp.47.404.625.439,00 | 100,01 % |
| 2 | Belanja Daerah : | Rp.1.053.665.638.363,00 | Rp.925.410.149.297,76 | 87,82 % |
| | a.Belanja Operasi | Rp.634.879.289.575,00 | Rp.605.452.809.449,60 | 95,36 % |
| | b.Belanja Modal | Rp.185.066.161.088,00 | Rp.96.750.682.097,94 | 52,27 % |
| | c.Belanja Tidak Terduga | Rp.22.600.000.000,00 | Rp.22.599.059.550,22 | 99,99% |
| | d.Belanja Transfer | Rp.211.120.187.700,00 | Rp.200.607.598.200,00 | 95,02 % |

**4.** Neraca

| No | | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Aset : | Rp. 1.511.982.436.569,37 |
| | a. Aset Lancar | Rp. 6.696.177.687,69 |
| | b.Investasi Jangka Panjang | Rp. 6.696.177.687,69 |
| | c. Aset Tetap | Rp. 1.426.657.079.085,25 |
| | d. Aset Lainnya | Rp. 53.267.654.331,15 |
| 2 | Kewajiban : | Rp. 66.617.547.668,07 |
| | a. Kewajiban Jangka Pendek | Rp. 42.167.547.668,07 |
| | b. Kewajiban Jangka Panjang | Rp. 24.450.000.000,00 |
| 3 | Ekuitas | Rp. 1.445.364.888.901,30 |

### 4.3.3 Hasil Wawancara

Pertanyaan untuk anggota Dinas Keuangan, Kabupaten Mamasa :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat?
   - Perlakuan akuntansi yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa sudah cukup baik karena sudah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terbaru yaitu SAP tahun 2010.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perlakuan akuntansi di Pemerintah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat?
   - Belum beradaptasi dengan baik terhadap Standar Akuntansi yang baru
   - Kurangnya sumber daya manusia dalam menjalankan teknologi yang semakin canggih.
3. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa agar perlakuan akuntansi terkait penyusunan laporan keuagan bisa lebih baik?
   - Melakukan pelatihan khusus kepada pegawai pemerintahan terkait penerapan SAP yang baru.
   - Menggunakan SAP yang baru ke semua akun dalam laporan keuangan agar bisa beradaptasi dengan baik.
   - Memberikan pelatihan khusus bagi para pegawai terkait pengoperasian teknologi yang semakin canggih.

### 4.3.4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil reduksi data dan peyajian data, dapat disimpulkan bahwa :

2. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa tahun 2021 sudah transparan dan cukup baik antara realisasi serta anggaran yang digunakan. Kemudian semua ditulis dengan sangat detail.
3. Neraca di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa tahun 2021 sudah sangat baik dan juga sudah ditulis dengan detail dan transparan.

# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa penyusunan Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat sudah mengacu pada Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan aturan-aturan pengelolaan keuangan yang baik dalam Pemerintahan.
2. Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat telah disusun dan disajikan dengan cukup baik sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang akurat, akuntabel dan transparan.
3. Laporan Keuangan dalam hal ini Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa masih cukup berimbang antara realisasi maupun anggarannya yang dapat dilihat dari persentase perealisasiannya rata-rata mencapai 95% ke atas bahkan ada yang melebihi 100%.

## 5.2 Saran

Berdasarkan data serta hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupeten Mamasa agar perlakuan akuntansi di Kabupaten Mamasa bisa lebih baik lagi.

1. Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang baru ke seluruh akun keuangan sehingga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap SAP yang baru.

2. Memberikan pelatihan khusus tentang penerapan SAP yang baru ke seluruh pegawai yang bersangkutan.
3. Memberikan pelatihan khusus tentang penggunaan teknologi atau alat-alat yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan sehingga bisa lebih mahir.

# DAFTAR PUSTAKA


Bastian, Indra. 2019. Audit Sektor Publik. Edisi 3.Jakarta : Salemba Empa

Belinda,Ariella.(2021) *Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik DalamSuatu Instansi Pemerintahan*.Universitas Tulungan

Biduri, Sarwenda. (2018). Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik. Jawa Timur. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Halim dan muhamma. 2018 ***Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah***. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empa

Hanggara, Dr. Agie. 2019. ***Pengantar Akuntansi. Surabaya***: CV. Jakad Publishing

Harnando.(2020) Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No.16 (Studi Kasus di PT. Pisma Putra Textile). Owner Riset dan Jurnal Akuntans. Vol 2

Haryanto dan Sahmuddin serta Arifuddin 2017.***Akuntasi Sektor Publ***ik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Kieso, Donald E. Weygandt, Jerry J. Warifel, Terry D. 2018.***Akuntansi Keuangan Menengah: Intermediate Accunting***, Edisi IFRS, Vol 1 Salemba Empat, Jakarta Selatan. 12160

Sumarsan, Thomas. (2017). ***Akuntansi dasar dan aplikasi dalam bisnis*** versi IFRS, Jilid 1, Edisi kedua. Penerbit Indeks.

Suwardjono.2016. Teori Akuntansi (Perekayasaan Pelaporan Keuangan) Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.

Weygandt, J., Kimmel, P., & Kieso, D. (2019). Financial Accounting: IFRS 3rd Edition. New Jersey: John Wiley & Sons.

Lampiran 1. Peta Administratif Kabupaten Mamasa

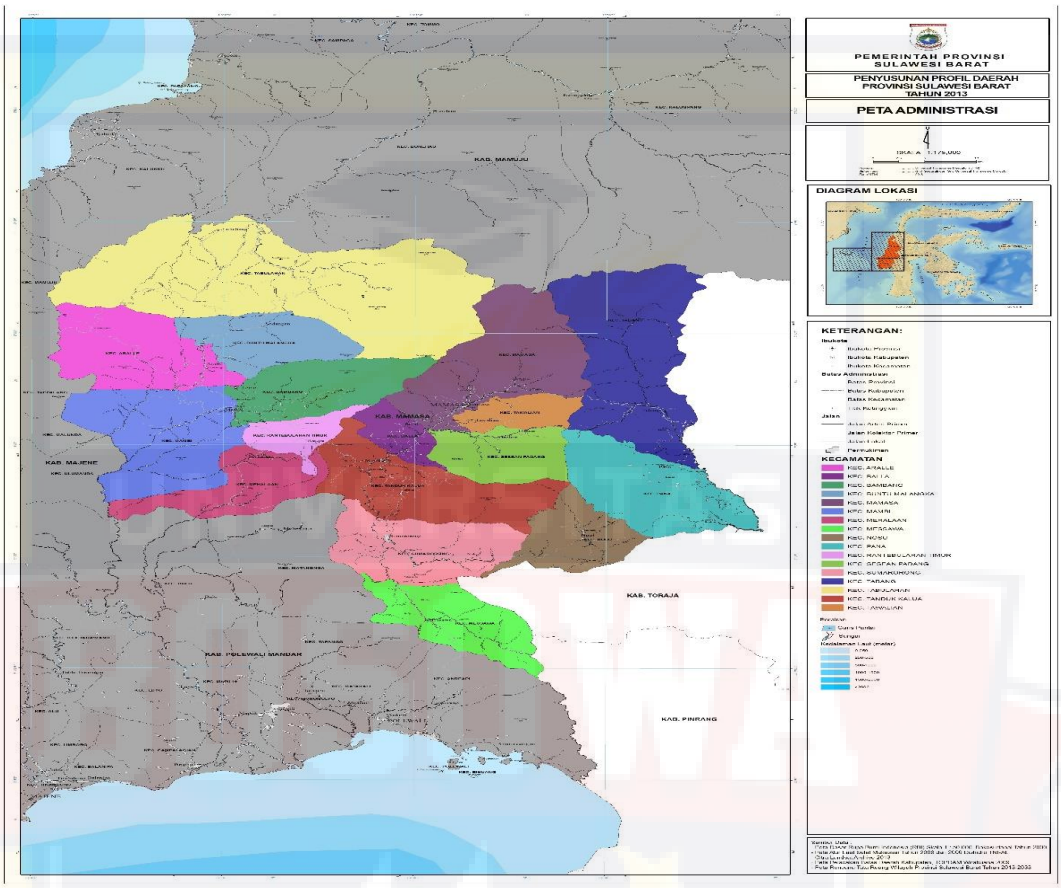

Lampiran 2. Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat

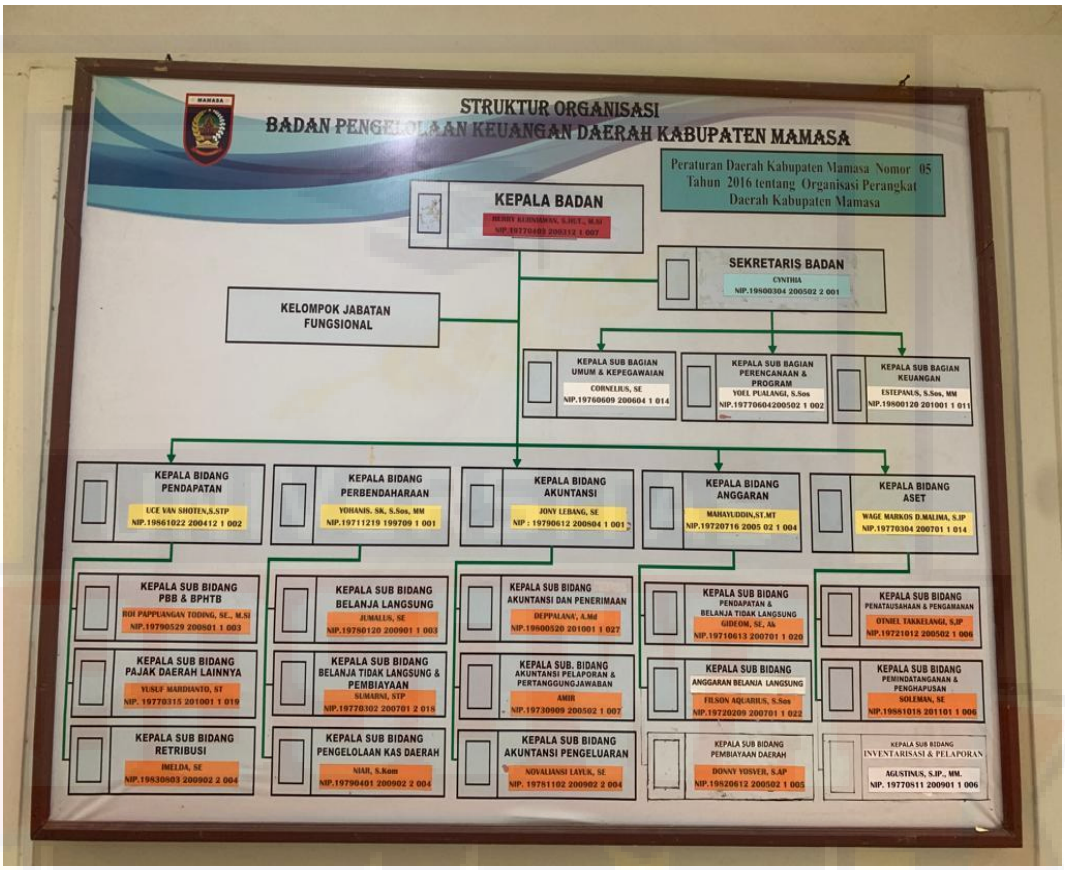

Lampiran 3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Mamasa

**PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

*periode 1 January s.d 31 December 2021*

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | LEBIH / (KURANG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | s/d PERIODE LALU | PERIODE INI | TOTAL | |
| 4 | **PENDAPATAN DAERAH** | 904.871.875.108,00 | 0,00 | 899.975.331.832,36 | 899.975.331.832,36 | (4.896.543.275,64) |
| 4.1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | 23.343.161.766,04 | 0,00 | 16.643.739.465,36 | 16.643.739.465,36 | (6.699.422.300,68) |
| 4.1.1 | **Pajak Daerah** | 5.411.941.725,87 | 0,00 | 4.297.034.538,00 | 4.297.034.538,00 | (1.114.907.187,87) |
| 4.1.1.06 | Pajak Hotel | 865.700.238,00 | 0,00 | 26.512.000,00 | 26.512.000,00 | (839.188.238,00) |
| 4.1.1.07 | Pajak Restoran | 968.989.794,39 | 0,00 | 1.537.913.280,00 | 1.537.913.280,00 | 568.923.485,61 |
| 4.1.1.08 | Pajak Hiburan | 6.460.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | (4.460.000,00) |
| 4.1.1.09 | Pajak Reklame | 131.509.306,00 | 0,00 | 263.960.550,00 | 263.960.550,00 | 132.451.244,00 |
| 4.1.1.10 | Pajak Penerangan Jalan | 1.451.236.570,80 | 0,00 | 1.679.928.816,00 | 1.679.928.816,00 | 228.692.245,20 |
| 4.1.1.14 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 1.916.711.551,68 | 0,00 | 354.244.462,00 | 354.244.462,00 | (1.562.467.089,68) |
| 4.1.1.15 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 0,00 | 0,00 | 284.281.520,00 | 284.281.520,00 | 284.281.520,00 |
| 4.1.1.16 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 71.334.265,00 | 0,00 | 148.193.910,00 | 148.193.910,00 | 76.859.645,00 |
| 4.1.2 | **Retribusi Daerah** | 4.099.289.064,00 | 0,00 | 5.269.398.711,00 | 5.269.398.711,00 | 1.170.109.647,00 |
| 4.1.2.01 | Retribusi Jasa Umum | 3.663.793.871,20 | 0,00 | 5.016.477.642,00 | 5.016.477.642,00 | 1.352.683.770,80 |
| 4.1.2.02 | Retribusi Jasa Usaha | 341.670.000,00 | 0,00 | 94.485.100,00 | 94.485.100,00 | (247.184.900,00) |
| 4.1.2.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 93.825.192,80 | 0,00 | 158.435.969,00 | 158.435.969,00 | 64.610.776,20 |
| 4.1.3 | **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** | 3.684.792.054,00 | 0,00 | 2.805.366.949,00 | 2.805.366.949,00 | (879.425.105,00) |
| 4.1.3.02 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD | 3.684.792.054,00 | 0,00 | 2.805.366.949,00 | 2.805.366.949,00 | (879.425.105,00) |
| 4.1.4 | **Lain-lain PAD yang Sah** | 10.147.138.922,17 | 0,00 | 4.271.939.267,36 | 4.271.939.267,36 | (5.875.199.654,81) |
| 4.1.4.01 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 529.379.301,05 | 0,00 | 192.719.300,00 | 192.719.300,00 | (336.660.001,05) |
| 4.1.4.03 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 810.000.000,00 | 0,00 | 237.703.572,00 | 237.703.572,00 | (572.296.428,00) |
| 4.1.4.04 | Hasil Kerja Sama Daerah | 0,00 | 0,00 | 340.128.320,00 | 340.128.320,00 | 340.128.320,00 |
| 4.1.4.05 | Jasa Giro | 3.118.414.231,90 | 0,00 | 722.258.363,00 | 722.258.363,00 | (2.396.155.868,90) |
| 4.1.4.08 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 490.280.001,24 | 0,00 | 1.770.676.122,00 | 1.770.676.122,00 | 1.280.396.120,76 |
| 4.1.4.11 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 2.068.524.691,67 | 0,00 | 11.367.385,40 | 11.367.385,40 | (2.057.157.306,27) |
| 4.1.4.12 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 4.290.086,24 | 0,00 | 19.144.903,96 | 19.144.903,96 | 14.854.817,72 |
| 4.1.4.15 | Pendapatan dari Pengembalian | 414.671.298,74 | 0,00 | 951.468.681,00 | 951.468.681,00 | 536.797.382,26 |
| 4.1.4.18 | Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) | 2.711.579.311,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.711.579.311,33) |
| 4.1.4.23 | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA | 0,00 | 0,00 | 26.472.620,00 | 26.472.620,00 | 26.472.620,00 |
| 4.2 | **PENDAPATAN TRANSFER** | 834.188.975.341,96 | 0,00 | 835.926.966.928,00 | 835.926.966.928,00 | 1.737.991.586,04 |
| 4.2.1 | **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat** | 819.460.927.000,00 | 0,00 | 820.332.812.926,00 | 820.332.812.926,00 | 871.885.926,00 |
| 4.2.1.01 | Dana Perimbangan | 665.434.719.000,00 | 0,00 | 666.415.280.926,00 | 666.415.280.926,00 | 980.561.926,00 |

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH — Halaman 1 dari 4

Printed By SimBD

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | LEBIH / (KURANG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | s/d PERIODE LALU | PERIODE INI | TOTAL | |
| 4.2.1.02 | Dana Insentif Daerah (DID) | 7.148.713.000,00 | 0,00 | 7.148.713.000,00 | 7.148.713.000,00 | 0,00 |
| 4.2.1.05 | Dana Desa | 146.877.495.000,00 | 0,00 | 146.768.819.000,00 | 146.768.819.000,00 | (108.676.000,00) |
| 4.2.2 | **Pendapatan Transfer Antar Daerah** | 14.728.048.341,96 | 0,00 | 15.594.154.002,00 | 15.594.154.002,00 | 866.105.660,04 |
| 4.2.2.01 | Pendapatan Bagi Hasil | 14.728.048.341,96 | 0,00 | 15.594.154.002,00 | 15.594.154.002,00 | 866.105.660,04 |
| 4.2.2.02 | Bantuan Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | 47.339.738.000,00 | 0,00 | 47.404.625.439,00 | 47.404.625.439,00 | 64.887.439,00 |
| 4.3.1 | **Pendapatan Hibah** | 18.235.508.000,00 | 0,00 | 16.642.034.700,00 | 16.642.034.700,00 | (1.593.473.300,00) |
| 4.3.1.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 18.235.508.000,00 | 0,00 | 16.642.034.700,00 | 16.642.034.700,00 | (1.593.473.300,00) |
| 4.3.3 | **Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan** | 29.104.230.000,00 | 0,00 | 30.762.590.739,00 | 30.762.590.739,00 | 1.658.360.739,00 |
| 4.3.3.01 | Lain-lain Pendapatan | 29.104.230.000,00 | 0,00 | 30.762.590.739,00 | 30.762.590.739,00 | 1.658.360.739,00 |
| 5 | **BELANJA DAERAH** | 1.053.665.638.363,00 | 0,00 | 925.410.149.297,76 | 925.410.149.297,76 | (128.255.489.065,24) |
| 5.1 | **BELANJA OPERASI** | 634.879.289.575,00 | 0,00 | 605.452.809.449,60 | 605.452.809.449,60 | (29.426.480.125,40) |
| 5.1.1 | **Belanja Pegawai** | 356.455.894.358,00 | 0,00 | 343.021.980.654,00 | 343.021.980.654,00 | (13.433.913.704,00) |
| 5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 278.762.421.245,00 | 0,00 | 275.421.753.194,00 | 275.421.753.194,00 | (3.340.668.051,00) |
| 5.1.1.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 8.572.452.240,00 | 0,00 | 7.438.730.107,00 | 7.438.730.107,00 | (1.133.722.133,00) |
| 5.1.1.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 47.648.909.556,00 | 0,00 | 47.367.717.520,00 | 47.367.717.520,00 | (281.192.036,00) |
| 5.1.1.04 | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 12.964.518.800,00 | 0,00 | 12.152.897.330,00 | 12.152.897.330,00 | (811.621.470,00) |
| 5.1.1.05 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 163.667.017,00 | 0,00 | 139.282.503,00 | 139.282.503,00 | (24.384.514,00) |
| 5.1.1.06 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 501.600.000,00 | 0,00 | 501.600.000,00 | 501.600.000,00 | 0,00 |
| 5.1.1.88 | Belanja Pegawai BOS | 7.842.325.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (7.842.325.500,00) |
| 5.1.2 | **Belanja Barang dan Jasa** | 222.300.792.502,00 | 0,00 | 212.210.411.935,60 | 212.210.411.935,60 | (10.090.380.566,40) |
| 5.1.2.01 | Belanja Barang | 67.457.547.322,00 | 0,00 | 57.815.919.407,00 | 57.815.919.407,00 | (9.641.627.915,00) |
| 5.1.2.02 | Belanja Jasa | 96.184.175.825,00 | 0,00 | 80.764.233.975,60 | 80.764.233.975,60 | (15.419.941.849,40) |
| 5.1.2.03 | Belanja Pemeliharaan | 7.470.165.740,00 | 0,00 | 6.927.319.211,00 | 6.927.319.211,00 | (542.846.529,00) |
| 5.1.2.04 | Belana Perjalanan Dinas | 40.980.186.915,00 | 0,00 | 38.569.495.937,00 | 38.569.495.937,00 | (2.410.690.978,00) |
| 5.1.2.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 2.810.700.000,00 | 0,00 | 2.641.300.000,00 | 2.641.300.000,00 | (169.400.000,00) |
| 5.1.2.88 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 7.398.016.700,00 | 0,00 | 25.492.143.405,00 | 25.492.143.405,00 | 18.094.126.705,00 |
| 5.1.3 | **Belanja Bunga** | 1.208.645.000,00 | 0,00 | 227.059.000,00 | 227.059.000,00 | (981.586.000,00) |
| 5.1.3.04 | Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) | 1.208.645.000,00 | 0,00 | 227.059.000,00 | 227.059.000,00 | (981.586.000,00) |
| 5.1.5 | **Belanja Hibah** | 53.466.757.715,00 | 0,00 | 48.557.657.860,00 | 48.557.657.860,00 | (4.909.099.855,00) |
| 5.1.5.02 | Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya | 35.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.5.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 52.793.140.715,00 | 0,00 | 47.884.040.860,00 | 47.884.040.860,00 | (4.909.099.855,00) |
| 5.1.5.07 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 638.617.000,00 | 0,00 | 638.617.000,00 | 638.617.000,00 | 0,00 |

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH — Halaman 2 dari 4

Printed By SimBD

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | LEBIH / (KURANG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | s/d PERIODE LALU | PERIODE INI | TOTAL | |
| 5.1.6 | **Belanja Bantuan Sosial** | 1.447.200.000,00 | 0,00 | 1.435.700.000,00 | 1.435.700.000,00 | (11.500.000,00) |
| 5.1.6.01 | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu | 1.406.200.000,00 | 0,00 | 1.394.700.000,00 | 1.394.700.000,00 | (11.500.000,00) |
| 5.1.6.02 | Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.6.03 | Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2 | **BELANJA MODAL** | 185.066.161.088,00 | 0,00 | 96.750.682.097,94 | 96.750.682.097,94 | (88.315.478.990,06) |
| 5.2.1 | **Belanja Modal Tanah** | 10.030.453.800,00 | 0,00 | 6.775.000.000,00 | 6.775.000.000,00 | (3.255.453.800,00) |
| 5.2.1.01 | Belanja Modal Tanah | 10.030.453.800,00 | 0,00 | 6.775.000.000,00 | 6.775.000.000,00 | (3.255.453.800,00) |
| 5.2.2 | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | 24.334.288.622,00 | 0,00 | 17.859.059.445,00 | 17.859.059.445,00 | (6.475.229.177,00) |
| 5.2.2.01 | Belanja Modal Alat Besar | 1.200.000.000,00 | 0,00 | 1.114.678.989,00 | 1.114.678.989,00 | (85.321.011,00) |
| 5.2.2.02 | Belanja Modal Alat Angkutan | 706.441.717,00 | 0,00 | 445.394.500,00 | 445.394.500,00 | (261.047.217,00) |
| 5.2.2.04 | Belanja Modal Alat Pertanian | 106.230.000,00 | 0,00 | 106.230.000,00 | 106.230.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 3.359.463.203,00 | 0,00 | 3.303.862.774,00 | 3.303.862.774,00 | (55.600.429,00) |
| 5.2.2.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 61.302.499,00 | 0,00 | 52.801.200,00 | 52.801.200,00 | (8.501.299,00) |
| 5.2.2.07 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 6.972.271.364,00 | 0,00 | 6.553.518.468,00 | 6.553.518.468,00 | (418.752.896,00) |
| 5.2.2.08 | Belanja Modal Alat Laboratorium | 2.314.652.000,00 | 0,00 | 2.098.438.069,00 | 2.098.438.069,00 | (216.213.931,00) |
| 5.2.2.10 | Belanja Modal Komputer | 2.810.236.639,00 | 0,00 | 2.259.358.512,00 | 2.259.358.512,00 | (550.878.127,00) |
| 5.2.2.16 | Belanja Modal Alat Peraga | 415.000.000,00 | 0,00 | 389.950.000,00 | 389.950.000,00 | (25.050.000,00) |
| 5.2.2.19 | Belanja Modal Peralatan Olahraga | 21.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (21.750.000,00) |
| 5.2.2.88 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 6.366.941.200,00 | 0,00 | 1.534.826.933,00 | 1.534.826.933,00 | (4.832.114.267,00) |
| 5.2.3 | **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** | 17.319.402.914,00 | 0,00 | 13.422.080.476,00 | 13.422.080.476,00 | (3.897.322.438,00) |
| 5.2.3.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | 17.312.492.264,00 | 0,00 | 13.415.169.826,00 | 13.415.169.826,00 | (3.897.322.438,00) |
| 5.2.3.02 | Belanja Modal Monumen | 6.910.650,00 | 0,00 | 6.910.650,00 | 6.910.650,00 | 0,00 |
| 5.2.4 | **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | 91.785.421.502,00 | 0,00 | 25.321.000.493,94 | 25.321.000.493,94 | (66.464.421.008,06) |
| 5.2.4.01 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan | 69.990.588.986,00 | 0,00 | 14.156.136.935,60 | 14.156.136.935,60 | (55.834.452.050,40) |
| 5.2.4.02 | Belanja Modal Bangunan Air | 17.617.962.516,00 | 0,00 | 7.106.994.558,34 | 7.106.994.558,34 | (10.510.967.957,66) |
| 5.2.4.03 | Belanja Modal Instalasi | 36.870.000,00 | 0,00 | 36.869.000,00 | 36.869.000,00 | (1.000,00) |
| 5.2.4.04 | Belanja Modal Jaringan | 4.140.000.000,00 | 0,00 | 4.021.000.000,00 | 4.021.000.000,00 | (119.000.000,00) |
| 5.2.5 | **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya** | 41.596.594.250,00 | 0,00 | 33.373.541.683,00 | 33.373.541.683,00 | (8.223.052.567,00) |
| 5.2.5.07 | Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi | 34.099.647.650,00 | 0,00 | 28.927.432.174,00 | 28.927.432.174,00 | (5.172.215.476,00) |
| 5.2.5.88 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 7.496.946.600,00 | 0,00 | 4.446.109.509,00 | 4.446.109.509,00 | (3.050.837.091,00) |
| 5.3 | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | 22.600.000.000,00 | 0,00 | 22.599.059.550,22 | 22.599.059.550,22 | (940.449,78) |
| 5.3.1 | **Belanja Tidak Terduga** | 22.600.000.000,00 | 0,00 | 22.599.059.550,22 | 22.599.059.550,22 | (940.449,78) |
| 5.3.1.01 | Belanja Tidak Terduga | 22.600.000.000,00 | 0,00 | 22.599.059.550,22 | 22.599.059.550,22 | (940.449,78) |
| 5.4 | **BELANJA TRANSFER** | 211.120.187.700,00 | 0,00 | 200.607.598.200,00 | 200.607.598.200,00 | (10.512.589.500,00) |
| 5.4.2 | **Belanja Bantuan Keuangan** | 211.120.187.700,00 | 0,00 | 200.607.598.200,00 | 200.607.598.200,00 | (10.512.589.500,00) |



Printed By SimBD

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | | | LEBIH / (KURANG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | s/d PERIODE LALU | PERIODE INI | TOTAL | |
| 5.4.2.05 | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 211.120.187.700,00 | 0,00 | 200.607.598.200,00 | 200.607.598.200,00 | (10.512.589.500,00) |
| | **SURPLUS / DEFISIT** | (148.793.763.255,00) | 0,00 | (25.434.817.465,40) | (25.434.817.465,40) | 123.358.945.789,60 |
| 6.1 | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | 151.293.763.255,00 | 0,00 | 28.182.347.784,06 | 28.182.347.784,06 | (123.111.415.470,94) |
| 6.1.1 | **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya** | 3.719.763.128,00 | 0,00 | 3.732.347.784,06 | 3.732.347.784,06 | 12.584.656,06 |
| 6.1.1.01 | Pelampauan Penerimaan PAD | 184.348.929,00 | 0,00 | 184.348.929,00 | 184.348.929,00 | 0,00 |
| 6.1.1.05 | Penghematan Belanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1.07 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | 2.107.468.486,00 | 0,00 | 2.107.468.485,06 | 2.107.468.485,06 | (0,94) |
| 6.1.1.08 | Sisa Belanja Lainnya | 1.427.945.713,00 | 0,00 | 1.427.945.713,00 | 1.427.945.713,00 | 0,00 |
| 6.1.1.99 | Koreksi SiLPA | 0,00 | 0,00 | 12.584.657,00 | 12.584.657,00 | 12.584.657,00 |
| 6.1.4 | **Penerimaan Pinjaman Daerah** | 147.574.000.127,00 | 0,00 | 24.450.000.000,00 | 24.450.000.000,00 | (123.124.000.127,00) |
| 6.1.4.04 | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) | 147.574.000.127,00 | 0,00 | 24.450.000.000,00 | 24.450.000.000,00 | (123.124.000.127,00) |
| 6.2 | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | (1.000.000.000,00) |
| 6.2.1 | **Pembentukan Dana Cadangan** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.01 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2 | **Penyertaan Modal Daerah** | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | (1.000.000.000,00) |
| 6.2.2.02 | Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | (1.000.000.000,00) |
| 6.2.3 | **Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3.03 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | 148.793.763.255,00 | 0,00 | 26.682.347.784,06 | 26.682.347.784,06 | (122.111.415.470,94) |
| | **SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN** | 0,00 | 0,00 | 1.247.530.318,66 | 1.247.530.318,66 | 1.247.530.318,67 |



Printed By SimBD

Lampiran 4. Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamasa

**NERACA**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA**

Per 31 December 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| **ASET** | | |
| ASET LANCAR | | |
| Kas di Kas Daerah | 229.594.272,10 | 1.492.017.659,90 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 27.743.724,00 | 13.167.500,00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 362.387.280,00 | 880.706.534,00 |
| Kas di BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Kas Dana BOS | 751.671.102,00 | 1.427.945.713,00 |
| Kas Dana Kapitasi pada FKTP | 50.516.415,56 | 184.348.928,16 |
| Kas Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Setara Kas | 0,00 | 0,00 |
| Investasi Jangka Pendek | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Pajak Daerah | 4.471.173.137,00 | 3.682.987.643,00 |
| Piutang Retribusi Daerah | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 28.003.969,00 | 28.003.969,00 |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat | 29.539.000,00 | 29.539.000,00 |
| Piutang Transfer Antar Daerah | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Lainnya | 1.007.128.559,74 | 1.125.789.374,46 |
| Penyisihan Piutang | (3.257.964.345,01) | (3.054.555.911,40) |
| Beban Dibayar Dimuka | 0,00 | 0,00 |
| Persediaan | 2.996.384.573,30 | 5.598.064.760,66 |
| JUMLAH ASET LANCAR | 6.696.177.687,69 | 11.408.015.170,78 |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | | |
| Investasi Jangka Panjang Non Permanen | | |
| Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara | 0,00 | 0,00 |
| Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah | 0,00 | 0,00 |
| Investasi dalam Obligasi | 0,00 | 0,00 |
| Investasi dalam Proyek Pembangunan | 0,00 | 0,00 |
| Dana Bergulir | 71.100.000,00 | 71.100.000,00 |
| Deposito Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 |
| Investasi Non Permanen Lainnya | (71.100.000,00) | (71.100.000,00) |
| Investasi Permanen Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen | 0,00 | 0,00 |
| Investasi Jangka Panjang Permanen | | |
| Penyertaan Modal | 25.361.525.465,28 | 14.142.525.465,28 |
| Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen | 25.361.525.465,28 | 14.142.525.465,28 |
| JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG | 25.361.525.465,28 | 14.142.525.465,28 |
| ASET TETAP | | |
| Tanah | 170.268.086.038,46 | 147.514.332.138,46 |
| Peralatan dan Mesin | 283.259.565.202,94 | 268.982.469.148,45 |
| Gedung dan Bangunan | 576.577.056.445,15 | 494.497.058.623,27 |
| Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 1.152.390.230.934,19 | 1.131.115.265.648,64 |
| Aset Tetap Lainnya | 18.027.709.640,75 | 18.177.709.640,75 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 1.691.455.135,84 | 674.877.000,00 |
| Akumulasi Penyusutan | (775.557.024.312,08) | (698.962.591.489,33) |
| JUMLAH ASET TETAP | 1.426.657.079.085,25 | 1.361.999.120.710,24 |
| DANA CADANGAN | | |
| Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH DANA CADANGAN | 0,00 | 0,00 |
| ASET LAINNYA | | |
| Tagihan Jangka Panjang | 1.515.873.752,00 | 1.515.873.752,00 |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 |
| Aset Tidak Berwujud | 1.265.100.500,00 | 1.464.845.500,00 |
| Aset Lain-lain | 51.731.834.379,15 | 51.753.947.258,64 |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (1.245.154.300,00) | (1.424.953.100,00) |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH ASET LAINNYA | 53.267.654.331,15 | 53.309.713.410,64 |
| **JUMLAH ASET** | **1.511.982.436.569,37** | **1.440.859.374.756,94** |
| **KEWAJIBAN** | | |



Printed By SimDA

| URAIAN | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 174.382.475,00 | 278.423.208,00 |
| Utang Bunga | 0,00 | 0,00 |
| Utang Pinjaman Jangka Pendek | 0,00 | 0,00 |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 95.713.992,33 | 107.215.609,95 |
| Utang Belanja | 17.482.910.064,00 | 14.078.779.209,00 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 24.414.541.136,74 | 7.475.348.454,09 |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 42.167.547.668,07 | 21.939.766.481,04 |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | |
| Utang kepada Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 |
| Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) | 0,00 | 0,00 |
| Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank | 24.450.000.000,00 | 0,00 |
| Utang kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | 24.450.000.000,00 | 0,00 |
| **JUMLAH KEWAJIBAN** | **66.617.547.668,07** | **21.939.766.481,04** |
| **EKUITAS** | | |
| EKUITAS | 1.445.364.888.901,30 | 1.418.919.608.275,90 |
| **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA** | **1.511.982.436.569,37** | **1.440.859.374.756,94** |

Lampiran 5. Pengambilan Data di BPKD Kabupaten Mamasa

Lampiran 6. Foto Bersama Bapak Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Mamasa

Lampiran 7. Foto Depan Gedung BPKD Kabupaten Mamasa

Lampiran 8. Pedoman Wawancara

Pertanyaan untuk anggota Dinas Keuangan, Kabupaten Mamasa :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat?
   - Perlakuan akuntansi yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa sudah cukup baik karena sudah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terbaru yaitu SAP tahun 2010.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perlakuan akuntansi di Pemerintah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat?
   - Belum beradaptasi dengan baik terhadap Standar Akuntansi yang baru
   - Kurangnya sumber daya manusia dalam menjalankan teknologi yang semakin canggih.
3. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa agar perlakuan akuntansi terkait penyusunan laporan keuagan bisa lebih baik?
   - Melakukan pelatihan khusus kepada pegawai pemerintahan terkait penerapan SAP yang baru.
   - Menggunakan SAP yang baru ke semua akun dalam laporan keuangan agar bisa beradaptasi dengan baik.
   - Memberikan pelatihan khusus bagi para pegawai terkait pengoperasian teknologi yang semakin canggih.

Lampiran 9. Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas

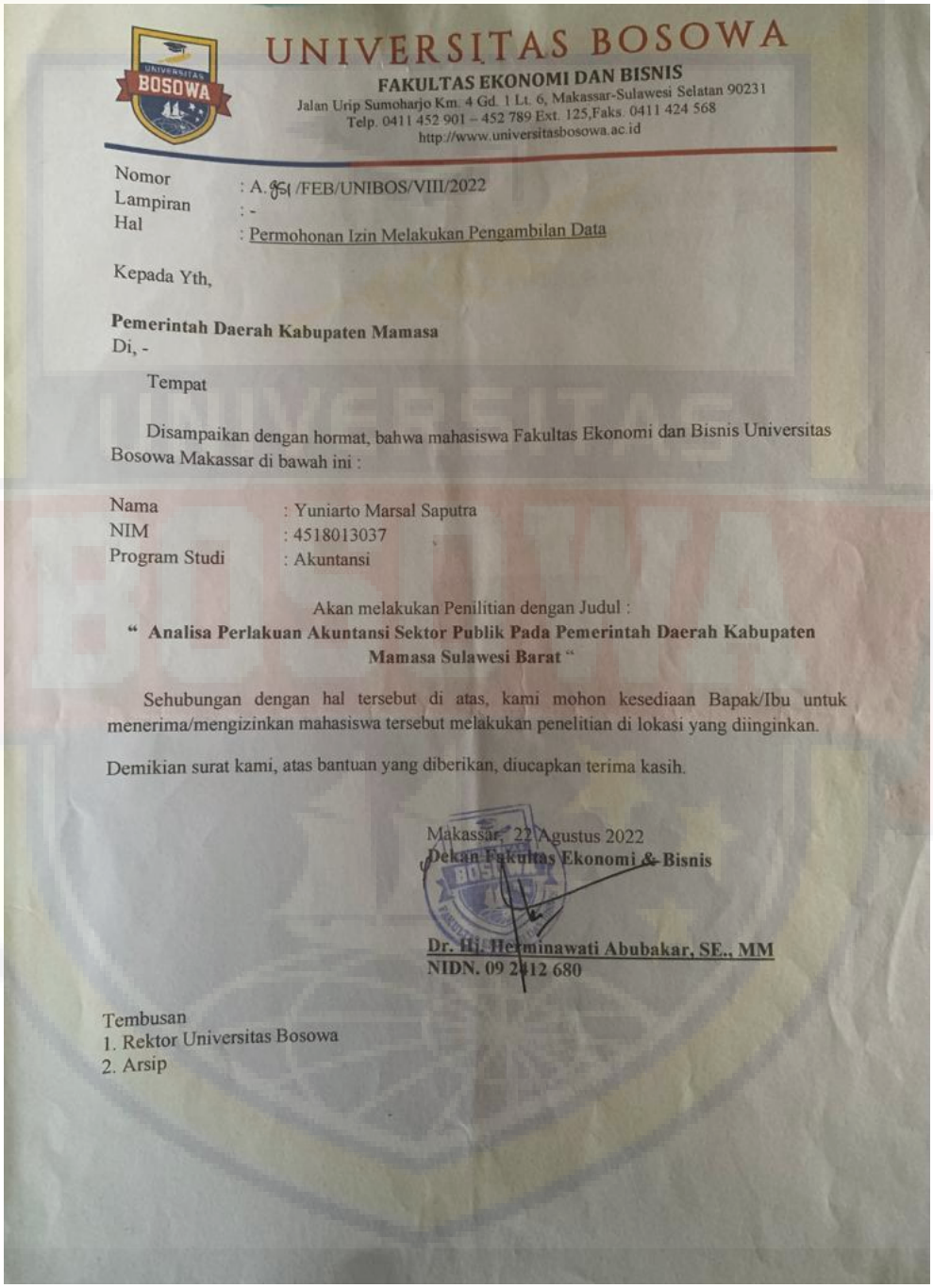

UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125,Faks. 0411 424 568
http://www.universitasbosowa.ac.id

Nomor : A. 851 /FEB/UNIBOS/VIII/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Melakukan Pengambilan Data

Kepada Yth,

**Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa**
Di, -

Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar di bawah ini :

Nama : Yuniarto Marsal Saputra
NIM : 4518013037
Program Studi : Akuntansi

Akan melakukan Penilitian dengan Judul :

**" Analisa Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat "**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian di lokasi yang diinginkan.

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 22 Agustus 2022
**Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis**

**Dr. Hj. Herminawati Abubakar, SE., MM**
**NIDN. 09 2412 680**

Tembusan
1. Rektor Universitas Bosowa
2. Arsip

Lampiran 10. Surat Permohonan Izin Pengambilan Data

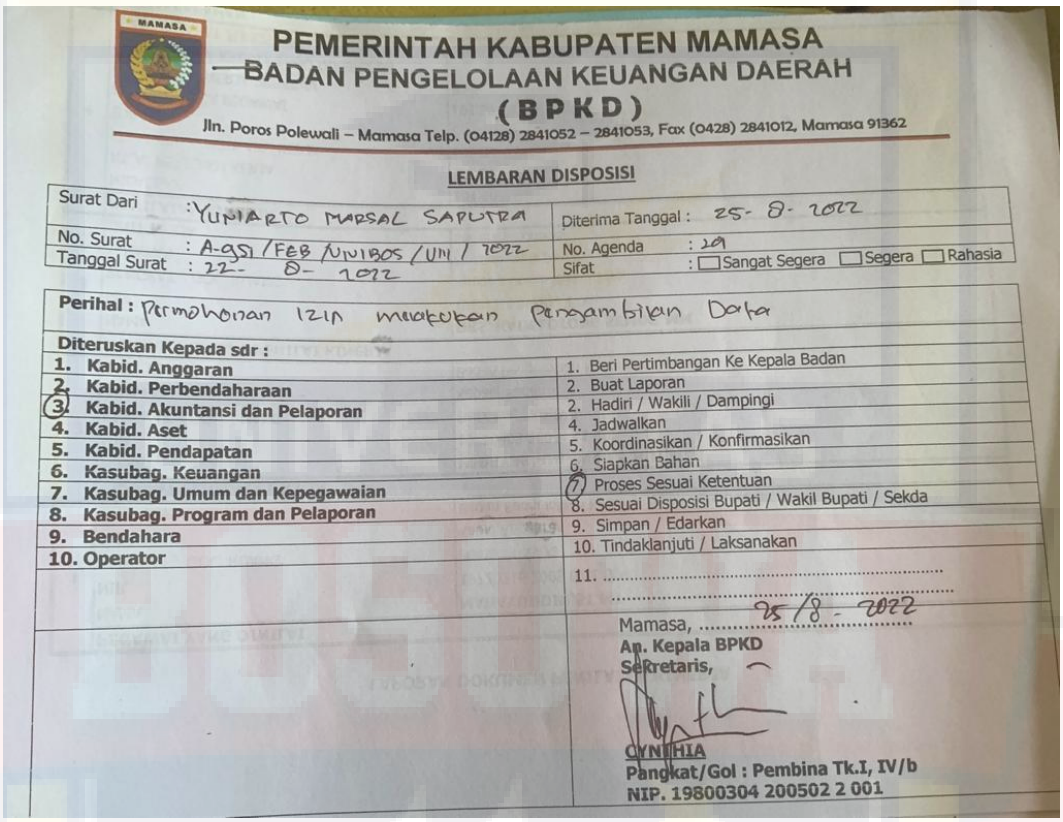

PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(BPKD)
Jln. Poros Polewali – Mamasa Telp. (0428) 2841052 – 2841053, Fax (0428) 2841012, Mamasa 91362

LEMBARAN DISPOSISI

| | |
|---|---|
| Surat Dari : YUNIARTO MARSAL SAPUTRA | Diterima Tanggal : 25-8-2022 |
| No. Surat : A-951/FEB/UNIBOS/UN/2022 | No. Agenda : 29 |
| Tanggal Surat : 22-8-2022 | Sifat : ☐ Sangat Segera ☐ Segera ☐ Rahasia |

Perihal : Permohonan Izin melakukan Pengambilan Data

| Diteruskan Kepada sdr : | |
|---|---|
| 1. Kabid. Anggaran | 1. Beri Pertimbangan Ke Kepala Badan |
| 2. Kabid. Perbendaharaan | 2. Buat Laporan |
| 3. Kabid. Akuntansi dan Pelaporan | 2. Hadiri / Wakili / Dampingi |
| 4. Kabid. Aset | 4. Jadwalkan |
| 5. Kabid. Pendapatan | 5. Koordinasikan / Konfirmasikan |
| 6. Kasubag. Keuangan | 6. Siapkan Bahan |
| 7. Kasubag. Umum dan Kepegawaian | 7. Proses Sesuai Ketentuan |
| 8. Kasubag. Program dan Pelaporan | 8. Sesuai Disposisi Bupati / Wakil Bupati / Sekda |
| 9. Bendahara | 9. Simpan / Edarkan |
| 10. Operator | 10. Tindaklanjuti / Laksanakan |
| | 11. ..... |

Mamasa, 25/8-2022
Ap. Kepala BPKD
Sekretaris,

CYNTHIA
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19800304 200502 2 001

Lampiran 11. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(BPKD)
Jl. Poros Polewali - Mamasa Telp (0428) 2841052 - 2841053, Fax; (0428) 2841012, Mamasa : 91362

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor: 800 / 190 / BPKD / VIII / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **CYNTIA**

NIP : 19800304 200502 2 001

Pangkat : Pembina Tk.I

Jabatan : Sekretaris BPKD

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas:

Nama : YUNIARTO MARSAL SAPUTRA

Stambuk/NIM : 4518013037

Program Studi : Akuntansi

Asal Studi : Universitas Bosowa

Telah melakukan penelitian/pengambilan data di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 23 s/d 25 Agustus 2022, dalam rangka penyusunan Skripsi Penelitian dengan judul: Analisa Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Pada Pemerintah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat.

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamasa, 25 Agustus 2022
Sekretaris BPKD

PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA BPKD

CYNTIA
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP 19800304 200502 2 001

**Riwayat Hidup**

Yuniarto Marsal Saputra panggilan Marsal, lahir di Pare-Pare pada tanggal 12 April 2000 dari pasangan Bapak Yulius Arruan Banga dan Ibu Kusmaning. Peneliti adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jln. Daeng Supu', Antang Nipa-Nipa, Makassar.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 002 Saludengen lulus tahun 2012, SMP Frater Mamasa lulus tahun 2015, SMA Negeri 1 Mamasa lulus tahun 2018, dan pada tahun 2018 mengikuti program S1 Akutansi di Kampus

Universitas Bosowa Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.